

**PENGARUH KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI TUHA PEUT
DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG DI KECAMATAN
JAYA BARU**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SITI ZAHIRA
NIM.170801017**

Jurusan Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2021

**“PENGARUH KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI TUHA PEUT
DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG
DI KECAMATAN JAYA BARU “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

SITI ZAHIRA
NIM. 170801017

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

Pembimbing II



Aklima, S.Fil.I., M.A
NIP. 198810062019032009

**PENGARUH KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI TUHA PEUT
DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG**

DI KECAMATAN JAYA BARU

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
11 Jumadil Akhir 1443 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua ,

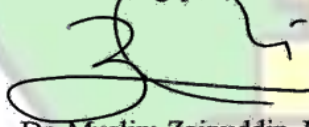


Dr. Ernita Dewi S. Ag. M. Hum
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,

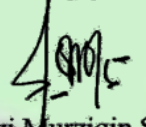
Aklima, S.Fil.I., M.A
NIP. 198810062019032009

Penguji I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Penguji II,



Ramzi Murziqin, S.H.I. M.A.
NIP. 198605132019031006

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Darussalam - Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi S. Ag. M. Hum
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zahira
NIM : 170801017
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam
Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Siti Zahira

ABSTRAK

Nama : Siti Zahira
NIM : 170801017
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Judul : Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut
Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya
Baru Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Aklima, S.Fil.I., M.A
Kata Kunci : *Tuha Peut Perempuan, Pembangunan Desa,
Keterlibatan Perempuan*

Penelitian ini untuk Mengetahui bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui pengaruh keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bentuk gampong yang melibatkan Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong terlihat saat perempuan dilibatkan langsung dalam pemerintahan, perempuan bisa menyampaikan kritik dan saran sehingga suara perempuan akan didengar. Sedangkan bentuk gampong yang tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut terlihat saat perempuan sama sekali tidak terlibat dalam pembangunan gampong, suara perempuan cenderung diabaikan hal ini dikarenakan tidak adanya keterwakilan suara perempuan dalam pemerintahan gampong sehingga perempuan tidak terlibat langsung dalam pembangunan gampong. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran perempuan di Tuha Peut mampu mempengaruhi kesejahteraan gender dan perempuan di level gampong ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang pro terhadap perempuan. Seperti kelompok anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok menjahit, kelompok kerajinan tangan, kelompok simpan pinjam khusus perempuan dan aktifnya posyandu serta PKK gampong. Sangat berbeda dengan gampong yang sama sekali tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut terlihat pada gampong tersebut perempuan sangat terpinggirkan, banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak pro terhadap perempuan. Sehingga kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan sangat tidak terjamin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

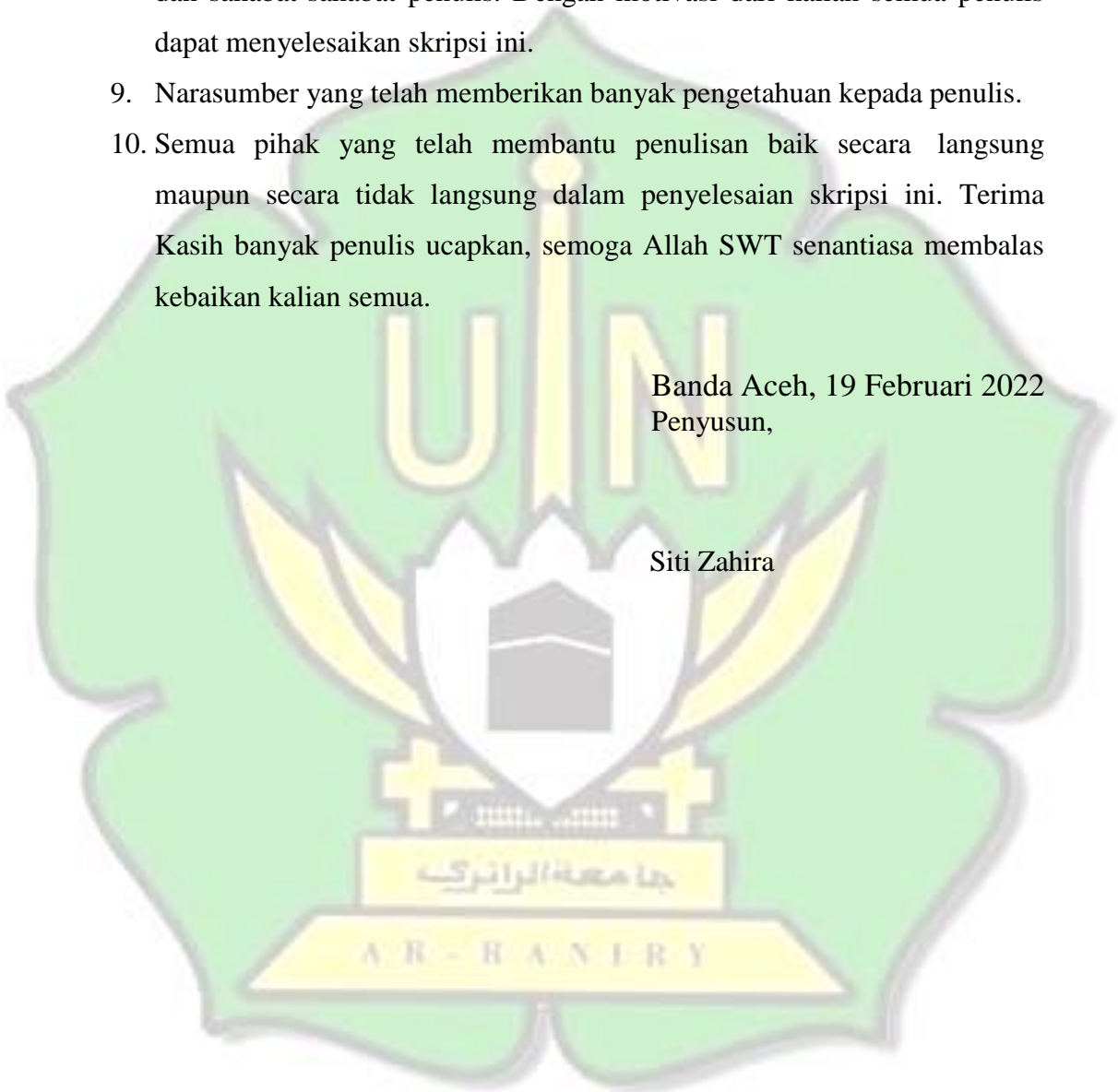
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
3. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
4. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
5. Dr. Muslim Zainuddin. M.Si Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Aklima, S.Fil., M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
8. Kepada orang terdekat Rini Maulina, Bunga Febriana, Yulis Saputra S.I.P, teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan family S.I.P dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 19 Februari 2022
Penyusun,

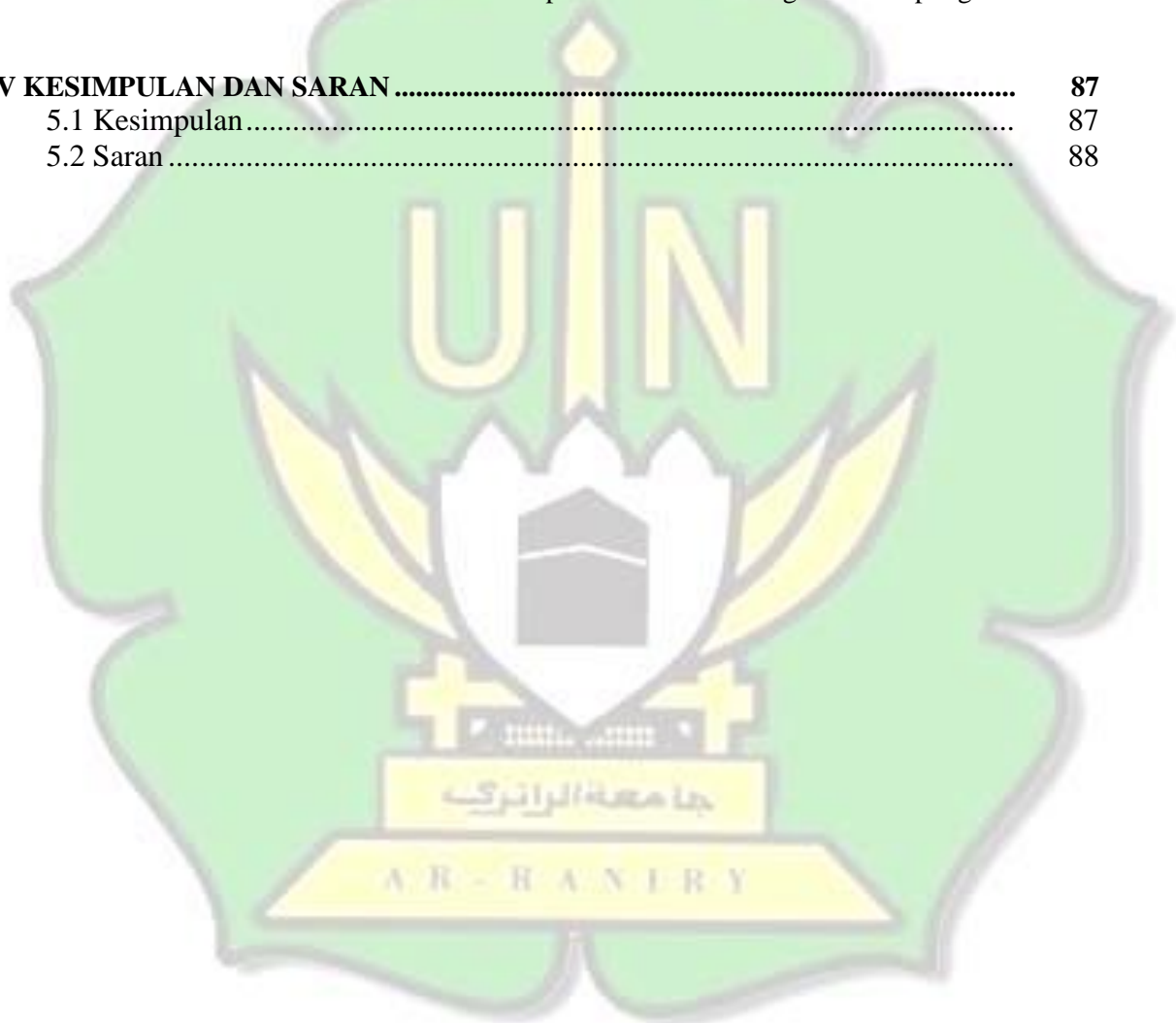
Siti Zahira



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERSYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Definisi Operasional	13
1.6 Penelitian Terdahulu	14
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Teori Kepemimpinan	19
2.1.1 Teori Perubahan.....	22
2.1.2 Teori Pembangunan.....	25
2.1.3 Teori Gender Perspektif Longwe	26
2.2 Peran Perempuan Dalam Pembangunan	33
2.3 Konsep Gender.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Fokus Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Informan Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Penarikan Keabsahan Data	43
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	45
4.1 Profil Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.....	45
4.1.1 Profil Gampong Geucue Meunara	45
4.1.2 Profil Gampong Lamjamee	46
4.1.3 Profil Gampong Lampoh Daya.....	51
4.1.4 Profil Gampong Emperon.....	53
4.2 Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	53
4.2.1 Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Geucue Meunara	53
4.2.2 Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Emperon.....	58
4.2.3 Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Lamjamee	62

4.2.4 Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Lampoh Daya	68
4.3 Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	73
4.3.1 Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Geucheu Meunara.....	73
4.3.2 Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Empesom.....	77
4.3.3 Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Lamjamee	81
4.3.4 Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Lampoh Daya	83
4.4 Analisis Keterwakilan Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam terselenggaranya pembangunan di wilayah desa tidaklah lepas dari peran penting partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang didasarkan atas keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Agar upaya pembangunan desa dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.¹

Lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak positif bagi pembangunan desa untuk lebih partisipatif.² Terkait dengan partisipasi, partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama di pedesaan membuat pandangan yang berbeda mengingat bahwa budaya telah membentuk persepsi dan pola pikir masyarakat dalam menempatkan posisi perempuan itu sendiri di lingkungan sosialnya. Meskipun kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan dominannya partisipasi laki-laki dari pada perempuan. Untuk menciptakan pembangunan yang maksimal dalam membangun desa yang lebih baik, maka kolaborasi antara laki-laki dan perempuan harus seimbang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, mengamanatkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam

¹ Syahrul, M, *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Pembangunan Desa* (Jakarta, 2014).

² Solekhan, M, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang, Setara Press, 2014).

konteks pembahasan ini bisa diartikan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pembangunan. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih sangat minim. Implikasinya, walaupun dari segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, akan tetapi secara kualitas lebih kecil dari laki-laki. Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan.³

Sebagai salah satu elemen *good governance*, kesediaan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan negara yang demokratis. Dalam proses demokrasi, partisipasi efektif antara perempuan dan laki-laki menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia.⁴

Pemberdayaan dalam konteks gender adalah pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, serta menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan.⁵ Konsep pemberdayaan perempuan ini lebih ditekankan pada keinginan atau tuntutan membagi kekuasaan, representasi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas di dalam pelaksanaan fungsinya dalam keluarga, melainkan juga di dalam kehidupan masyarakat luas. Peranan wanita dalam pembangunan mengandung dua pengertian: pertama, pembangunan memberi kemudahan bagi kaum wanita untuk ikut berupaya meningkatkan diri dan keluarganya; dan kedua, pembangunan memberi kemudahan bagikaum wanita untuk menyalurkan tenaga,

³ Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta, Republik Indonesia).

⁴ Kartono, Drajat Tri, *Sosiologi Distribusi*, Universitas Terbuka, (Jakarta, pp.1-54.ISBN).

⁵ Mosse, J.C. *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007).

ketrampilan, pikiran dan keahliannya dalam proses pembangunan.⁶

Pada dasarnya partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan hal yang penting karena keterlibatan perempuan diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya.⁷

Sejak zaman kejayaan Kesultanan Iskandar Muda (1607-1636), gampong-gampong di Aceh telah mengenal adanya tuha peut. Tuha peut merupakan lembaga adat dan lembaga pemerintah gampong. Saat ini, Tuha Peut gampong kembali diakui dan memiliki peranan penting di pemerintahan gampong dengan posisinya sebagai salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintahan gampong. Istilah lain tuha peut gampong, adalah badan permusyawaratan gampong, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan gampong.⁸

Tuha peut adalah dewan atau orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Keberadaan Tuha Peut berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong merupakan Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Gampong sebagai pengontrol Pelaksanaan Pemerintahan Gampong seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Anggota Tuha Peut Gampong merupakan wakil dari penduduk gampong bersangkutan yang

⁶ Melly G. Tan (1975).

⁷ ibid

⁸ Gampong adalah sebutan untuk Desa di Propinsi Aceh, sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dilaksanakan oleh Keuchik, Teungku Imeum Meunasah, beserta perangkat Gampong dan Tuha Peut. Sedangkan Djuned mengemukakan bahwa Gampong dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, balang, padang dan hutan. Dalam arti hukum Gampong merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial. T. M. Djuned, "Iventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh", Laporan Penelitian (Banda Aceh: Fak. Hukum Unsyiah dan Pemprov NAD, 2008), 639.

berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.⁹

Pada masa kemerdekaan, Muhammad Gade Ismail mengatakan, sebelum berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, lembaga tuha peut ini berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan gampong sebagai lembaga pengontrol (legislatif), hukum, adat, dan peradilan (yudikatif) bagi setiap lapisan masyarakat. Sedangkan unsur Tuha Peut terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, cerdik pandai atau cendikiawan dan pemangku adat. Peresmian anggota Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Tuha Peut gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan gampong. Pimpinan dan anggota Tuha Peut gampong tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan pemerintahan gampong, karena kedudukan Tuha Peut sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong. Sedangkan masa jabatan Tuha Peut adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk masa 1 (satu) kali jabatan berikutnya.¹⁰

Tuha Peut Gampong sebagai Lembaga Adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu diakui secara formal menjadi lembaga yang mempunyai peran dalam pemerintahan Gampong. Pengakuan Lembaga Tuha Peut Gampong ini menjadi lembaga resmi pemerintahan Gampong tidak menghilangkan sifatnya sebagai lembaga adat, karena dengan demikian akan tetap diakui dan mudah berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Tuha Peut Gampong merupakan Badan Perwakilan gampong dengan berkedudukan sebagai badan perwakilan akan berfungsi menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan warga gampong. Oleh karena itu pembentukan tuha peut Gampong menjadi wadah demokrasi bagi warga masyarakat melalui mekanisme yang representatif bagi masyarakat Gampong dengan memperhatikan karakteristik

⁹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁰Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab V Pasal 31 Ayat 1, Pasal 33 ayat 2.

dari Gampong masing-masing.¹¹

Melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Di Aceh, BPD disebut dengan Badan Perwakilan Gampong (Tuha Peut). Tuha Peut dapat disebut sebagai Badan Legislatif Gampong (BLG) atau "DPR Gampong" yang memiliki berkedudukan sejajar dan mitra kerja Pemerintah Gampong (Eksekutif/Kades). Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Dengan adanya Tuha Peut gampong akan dapat memperkuat lembaga pemerintahan gampong, adat istiadat dan pelaksanaan Syariat Islam ditingkat gampong serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh darussalam.¹²

Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa tersebut untuk menjaga eksistensi dan jati dirinya. Adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang terkandung di dalamnya unsur-unsur keagamaan yang berkembang dalam masyarakat secara turun temurun melalui keyakinan tertentu.¹³

Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai institusi walaupun wujudnya belum mengambil bentuk seperti lembaga pemerintahan, tetapi telah memainkan peran penting dalam mengatur pola hidup bangsa. Karena itu sebuah ungkapan bijak dalam hadih maja menyebutkan mate aneuek meupat jeurat, gadoh adat pat tamita. Ungkapan ini bukan hanya pepatah semata, tetapi merupakan pernyataan yang menegaskan tentang pentingnya melestarikan adat sebagai pranata sosial dalam hidup bermasyarakat. Peranan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh menentukan perilaku dan watak masyarakat.

¹¹Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tuha Peut Gampong.

¹²Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹³Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Aceh: Nadiya Foundation, 2004), hlm 65.

Adat merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.¹⁴

Adat juga mewariskan sebuah hukum non formal dalam masyarakat, yaitu hukum adat yang merupakan hukum pelengkap dari hukum yang berlaku secara umum (hukum positif). Di samping tunduk pada hukum positif, masyarakat juga terkait dengan ketentuan adat. Karena itu pelaksanaan hukum adat di Aceh secara berlanjut dilaksanakan oleh lembaga adat. Tiap lembaga adat di Aceh mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing baik yang melekat pada tiap lembaga maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Karena itu tiap jabatan struktural dalam pemerintahan adat melekat fungsi (atribut) untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan bentuk organ atau struktur dalam sebuah lembaga.¹⁵

Lembaga adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan begitu signifikannya peran lembaga adat, pada kasus-kasus tertentu sebagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga pengadilan formal. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Lembaga Tuha Peut mempunyai kewenangan dalam menjaga eksistensi nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, menegakkan hukum adat, dan

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 45.

menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Lembaga Tuha Peut memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong.¹⁶

Dapat dipastikan bahwa hampir 90% penyelesaian masalah perdata di tingkat gampong diselesaikan secara adat dan hampir separuh lebih masalah yang timbul melibatkan kaum perempuan sebagai kelompok mayoritas yang tinggal di desa-desa. Sayangnya sumber daya yang besar dari kaum perempuan tidak diberdayakan dengan alasan tradisi bahwa sejak dulu perempuan tidak dilibatkan dalam musyawarah desa. Tugas perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus keluarganya dan tidak perlu ikut campur dalam persoalan masyarakat.¹⁷

Secara statistik jumlah penduduk perempuan menepati posisi terbanyak dibandingkan laki-laki, dengan demikian kasus-kasus yang terjadi juga akan melibatkan perempuan di dalamnya. Oleh karena itu, penyelesaian setiap kasus perkelahian antar perempuan dan perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga menjadikan perempuan sebagai salah satu mediator atau pihak yang menyelesaikan kasus tersebut dengan berpijak pada kearifan dan pertimbangan nilai-nilai gender. Sayangnya ketika kasus ini dilaporkan kepada tokoh adat seperti keuchik, maka akan diselesaikan tanpa menghadirkan tokoh perempuan lain yang secara psikologis memahami latar belakang munculnya persoalan tersebut.¹⁸

Secara perundang-undangan yang tercantum dalam memberikan porsi yang cukup besar kepada perempuan. Dalam struktur tuha peut gampong (legislatif desa) harus ada dua orang perempuan yang ditempatkan sebagai anggota dalam tim tuha peut. Qanun ini memberikan sinyal betapa pentingnya melibatkan suara perempuan dalam penyelesaian masalah agar timbul rasa

¹⁶ Kamaruddin, dkk., "Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat", *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, Nomor 1 (mei, 2013), hlm 53.

¹⁷Ernita Dewi, *Peran Perempuan Dalam Sistem Adat di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), hlm 27.

¹⁸ *Ibid.*

keadilan antara kaum perempuan dan laki-laki. Sayangnya qanun ini tidak dijalankan secara optimal, bahkan ada keuchik yang tidak mengetahui tentang qanun ini.¹⁹

Masyarakat Aceh sebagian besar masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang (Keuchik) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.²⁰ Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang Aceh, karena sangat gemar dengan “bermufakat”, terutama dalam hal “Peujroh Nanggroe/ aspek hukum adat ” Karena sifat itulah, maka lembaga Tuha Peut ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam Qanun No. 8 Tahun 2004 Unsur Tuha Peut Gampong disebutkan :

- a. Unsur – unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari : - Unsur Ulama Gampong. - Tokoh Masyarakat termasuk pemuda dan perempuan. - Pemuka Adat. - Cerdik Pandai/Cendikiawan.
- b. Jumlah anggota Tuha Peut Gampong di tentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya pada Gampong setempat. Tuha Peut atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan– kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm 28.

²⁰ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, hlm 61.

²¹ Qanun Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2004 Tentang Unsur-unsur Tuha Peut Gampong.

Dalam pelaksanaan tugas tuha peut gampong antara lain diantaranya: (1) Membentuk panitia pemilihan Geuchik; (2) Menetapkan calon terpilih Geuchik; (3) Mengusulkan pemberhentian Geuchik; (4) Menyusun Reusam (peraturan) Gampong bersama Geuchik; (5) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama Geuchik; (6) Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga; (7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik; (8) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam (peraturan) dan Keputusan Geuchik; (9) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (10) Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, pergabungan dan penghapusan gampong; (11) Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong; (12) Mengusulkan pejabat Geuchik; (13) Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.²²

Sedangkan wewenang dari tuha peut adalah: (1) Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat; (2) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; (3) Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam; (5) Menerapkan ketentuan adat; (6) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; (7) Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan (8) Menegakkan hukum adat.²³

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh, keanggotaan Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan jumlah penduduk yang ada dalam suatu gampong dengan ketentuan sebagai berikut:²⁴

- a. 1 sampai 1.500 jiwa, dipilih 7 orang Tuha peut Gampong;
- b. 1.501 sampai 2.000 jiwa penduduk gampong, dipilih 9 orang Tuha Peut Gampong;
- c. 2.001 sampai 2.500 jiwa penduduk Gampong dipilih 11 orang Tuha Peut

²² Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab V Pasal 31 Ayat 1, Pasal 33 Ayat 2.

²³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Bagian kelima, pasal 18.

²⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 4 Tentang Pembentukan dan Kedudukan Tuha Peut Gampong.

Gampong;

- d. 2.501 sampai 3000 jiwa penduduk Gampong, dipilih 13 orang Tuha Peut Gampong;
- e. Lebih dari 3.000 jiwa penduduk Gampong, dipilih 15 orang Tuha Peut Gampong.

Jumlah Tuha Peut per masing-masing Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
**Rekapitulasi Anggota Tuha Peut Gampong di Kecamatan Jaya Baru
Kota Banda Aceh**

No	Gampong	Tuha Peut		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bitai	7	0	7
2	Emperom	8	1	9
3	Geuceu Menara	5	4	9
4	Lamjame	9	0	9
5	Lampoh Daya	9	0	9
6	Lamtemen Barat	9	0	9
7	Lamtemen Timur	7	2	9
8	Punge Blang Cut	9	0	9
9	Ulee Pata	5	0	5

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Tuha Peut laki-laki dan perempuan di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh 75 orang.²⁵ Dari 9 Gampong di Kecamatan Jaya Baru hanya 3 gampong yang memiliki keterwakilan Tuha Peut perempuan. Sementara 6 gampong tidak terwakili perempuan sebagai Tuha Peut Gampong.

Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, mengatur lembaga-lembaga adat, termasuk mengaktifkan kembali lembaga Tuha Peut dalam berbagai perangkat regulasi/ aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah Aceh. Selanjutnya, Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus dan terakhir dengan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka lahirlah berbagai produk hukum berupa qanun, yang menempatkan kembali lembaga dan peran Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong dan Mukim di Aceh.²⁶

Ketentuan pemahaman selama ini bahwa Tuha Peut harus seluruhnya laki-laki. Kini, Tuha Peut perempuan meskipun dalam jumlah yang tidak besar ikut berkiprah dalam masyarakat Aceh. Keberadaan tuha peut perempuan itu bukan keinginan dari perempuan itu sendiri, akan tetapi merupakan perintah dari qanun yang mengharuskan perempuan harus ada dalam keanggotaan tuha peut. Dengan demikian keberadaan Tuha Peut perempuan perlu didukung agar dapat berperan secara efektif dalam pembangunan gampong untuk kesejahteraan bersama.

Ini menjadi menarik untuk dikaji karena berdasarkan regulasi yang ada, penelitian sebelumnya telah menganulir pentingnya keseimbangan peran antara laki laki dan perempuan dalam pembangunan desa, sehingga perlu diketahui bagaimana pengaruh peran Tuha Peut perempuan, dan bagaimana pengaruh

²⁵ Kantor Camat Jaya Baru, 2021.

²⁶ Badruzzaman, supra note. Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugastugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bandingkan Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya UndangUndang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 (12), 2011.

ketidakterwakilannya anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan desa. Berdasarkan regulasi yang ada yaitu; keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan desa, maka fokus kajian dari penelitian ini yaitu **“Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengaruh keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang studi ilmu politik.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang, serta dapat menjadi bahan acuan agar penelitian selanjutnya dapat lebih

baik.

b) Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap aparatur dan masyarakat Gampong dalam menerapkan keterwakilan perempuan sebagai anggota Tuha Peut sebagai andil dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap aparatur dan masyarakat Gampong dalam menerapkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh .
3. Peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh keterwakilan Tuha Peut perempuan dan ketidakterwakilan perempuan sebagai anggota Tuha Peut dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya. Dalam penelitian ini diartikan untuk mengkaji bagaimana pengaruh keterwakilan perempuan sebagai tuha peut yang dapat memberikan perubahan dalam pembangunan gampong.²⁷

²⁷ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, hlm 61.

2. Tuha Peut

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang (Keuchik) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka lembaga tuha peut ini mempunyai saham yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.²⁸

3. Gampong

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh. Gampong memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan, harta kekayaan. dan batas teritorial. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat-istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan “Peradilan Adat” sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.²⁹

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan “Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru”, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

Penelitian pertama dilakukan oleh Zulfiani di kutip dari jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh dengan judul Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Di Kota Langsa.

²⁸ ibid

²⁹ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunny*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007, hlm 44.

Pasal 37 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) anggota Tuha Peuet Gampong diambil dari kaum perempuan. Namun kenyataannya berdasarkan jumlah gampong yang ada di Kota Langsa keterwakilan Perempuan sebagai Tuha Peut belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota Langsa, Apa faktor dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Tuha Peut di Kota Langsa Tidak terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota belum terpenuhi karena ada beberapa gampong di Kota Langsa yang tidak ada keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut Gampong, walaupun jumlah penduduk di Kota Langsa lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki. Adapun faktor dan hambatan penyebab keterwakilan perempuan tuha peut tidak terpenuhi karena disebabkan masih banyak kaum perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri dan masih banyak anggapan kaum laki-laki terhadap perempuan, bahwa tugas perempuan hanya di dapur, di sumur dan di kasur, selain itu juga di tambah dengan faktor budaya masyarakat yang masih bersifat patriarki (berlawanan), serta hambatan di bidang fisik, sosial budaya, sikap pandang, historis dan kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan.³⁰

Penelitian kedua dilakukan oleh Munawiah dikutip dari jurnal dengan judul Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Meureudu. Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang partisipasi perempuan sebagai anggota Tuha Peut gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Meureudu. Lembaga Tuha Peut gampong merupakan badan permusyawaratan gampong, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan

³⁰ Zulfiani, Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Di Kota Langsa, jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2018.

terhadap penyelenggara pemerintahan gampong. Lembaga Tuha peut perempuan adalah wakil perempuan yang ada di dalam pemerintahan gampong yang menjunjung tinggi aspirasi perempuan. Keberadaan mereka sangat diperlukan dalam pemerintahan gampong karena banyak permasalahan yang terjadi dalam gampong, terutama permasalahan terkait dengan perempuan, maka harus dilibatkan perempuan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan gampong akan membantu mencapai persamaan dan keadilan di tingkat gampong. Data diperoleh melalui wawancara anggota tuha peut perempuan dan laki-laki, keucik gampong, tokoh masyarakat dan unsur pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga Tuha Peut gampong tidak hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala gampong (Keucik) namun mereka dapat juga melakukan pengawasan terhadap reusam gampong, pengelolaan keuangan gampong, dan juga mediator dan negosiator dari permasalahan yang terjadi di masyarakat.³¹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fauzi Abubakar dikutip dari jurnal dengan judul Peran Perempuan Dalam Lembaga Tuha Peut Sebagai Lembaga Adat Aceh Dan Pemerintahan Gampong. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan dalam wacana feminisme yang tidak hanya dalam bentuk pembicaraan dan debat teoretis tetapi juga praktis di berbagai belahan dunia, termasuk di Aceh, Indonesia. Dalam tataran praktis, peran perempuan telah dimainkan di berbagai lembaga seperti di lembaga adat/konvensional dan lembaga pemerintah. Fokus permasalahan adalah bagaimana peran perempuan dalam lembaga adat 'Tuha Peut' dan pemerintah daerah Aceh. Melalui pendekatan historis, tulisan ini mencoba menggali peran perempuan dalam lembaga adat 'Tuha Peut' dan pemerintah daerah di Aceh. Berdasarkan berbagai data yang dikumpulkan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa peran perempuan dalam lembaga Tuha Peut, Sebagai lembaga adat Aceh dan penyelenggara pemerintahan Gampong Aceh, peran laki-laki setara, terutama

³¹ Munawiah, Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Meureudu, jurnal Vol 3, No 1 (2018).

dalam merumuskan kebijakan di Gampong. Data juga menunjukkan bahwa peran perempuan lebih menonjol, terutama dalam upaya mencapai kebijakan kesetaraan gender. Perempuan Aceh tidak hanya bisa memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Keuchik (ketua aliansi masyarakat adat Gampong) tetapi juga bisa memberikan pengawasan kepada Reusam Gampong. Perempuan juga dapat menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik yang muncul di Aceh melalui musyawarah masyarakat adat dan menawarkan solusi demi mengakhiri konflik secara baik tanpa menempuh jalur hukum formal dan resmi.³²

Penelitian keempat dilakukan oleh Zulfikar dikutip dari skripsi dengan judul Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong). Lembaga Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga Tuha Peut terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Peran lembaga Tuha Peut antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Tuha Peut sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong dan Apa saja yang menjadi penghambat Tuha Peut dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat direpresentasikan

³² Fauzi Abubakar, Peran Perempuan Dalam Lembaga Tuha Peut Sebagai Lembaga Adat Aceh Dan Pemerintahan Gampong. Jurnal 2020

bahwa pelaksanaan peran Tuha Peut sebagai perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota Tuha Peut kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat Tuha Peut dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong.³³

Penelitian Kelima dilakukan oleh Ernita Dewi dengan judul Peran Perempuan Dalam Sistem Adat Di Aceh. Buku ini menjelaskan perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama penting dalam memberikan kontribusi dalam ranah pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan juga Negara. Segala bentuk diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan sejatinya sudah harus dihilangkan seiring dengan semakin tingginya akses perempuan dalam bidang pendidikan. Ungkapan dan pendapat yang memojokkan perempuan sebagai pihak yang tidak mampu memberikan sumbangsih dalam bidang sosial, adalah pernyataan subjektif yang tidak memiliki dasar yang kuat. Perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam berfikir dan bertindak, meskipun harus disadari bahwa dalam kodrati ada fungsi-fungsi tugas yang menjadi milik hakiki perempuan, seperti hamil, melahirkan dan karakter pribadi yang selalu dinisbahkan kepada perempuan. Akan tetapi dalam hal melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan memberikan solusi, perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama. Ketika perempuan dan laki-laki diberikan akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga diasah kemampuannya secara berkelanjutan, maka skill yang dimiliki perempuan dan lelaki tidak jauh berbeda. Maka dari itu

³³ Zulfikar, Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong), Skripsi 2019

tidak ada halangan untuk tidak melibatkan perempuan dalam semua aktivitas publik yang sesuai dengan kemampuan mereka.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru. Berbeda dengan penelitian di atas terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan. Persamaan penelitian di atas adalah dari metode yang digunakan yaitu metode deskriptif komperatif dengan pendekatan kualitatif.



³⁴ Ernita Dewi. Peran Perempuan Dalam Sistem Adat Di Aceh *Aceh* (Banda Aceh: Ar-RaniryPress, 2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Kepemimpinan

1. Teori Sifat

Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat dengan kriteria sukses tertentu. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin.³⁵

2. Teori Pribadi-Perilaku

Di akhir tahun 1940-an para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana seseorang berperilaku menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang. Daripada berusaha menemukan sifat-sifat, mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya.³⁶

3. Teori Kepemimpinan Situasional

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu.

³⁵ Gibson, Ivancevich, donnelly, *op.cit.* hlm 11.

³⁶ *Ibid*, hlm 14-15.

Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.³⁷

2.1.1. Teori Perubahan

Kingsley Davis memberikan definisi perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. dari pengertian diatas terpaparkan perubahan sosial itu yang berubah adalah pada struktur dan sistem sosialnya. Menurut Soekanto (1990) perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Teori-teori perubahan sosial adalah sebagai berikut :³⁸

1. Teori Evolusi (Evolution Theory)

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. macam-macam teori tentang evolusi adalah :

- a) Universal Theories of Evolution, teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen.

2. Teori Fungsionalis (Functionalist Theory)

Perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsurunsur kebudayaan dalam masyarakat. Apabila perubahan 'itu' ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Pandangan Teori Fungsionalis adalah sebagai berikut :

³⁷ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontrovensi dan Aplikasi*, terjemahan Hadyana Pujaatmaka, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), hlm 45.

³⁸ Soekanto (1990)

- a) Setiap masyarakat relatif bersifat stabil.
- b) Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat.
- c) Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi.
- d) Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok masyarakat.³⁹

2.2.2. Teori Pembangunan Desa

Rostow menyatakan, bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak input dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:⁴⁰

- a. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu: Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- b. Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan

³⁹ Soekanto (1990)

⁴⁰Fauzi Kurniawan, "Beberapa Teori Tentang Pembangunan", <http://beberapa-teoritentang-pembangunan-dan.html> post 29-03 -2016

penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 72 tahun 2005 Tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
- 2) Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan Desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan melaksanakan (memanage) pembangunan di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.⁴¹

2.2.3. Teori Gender Perspektif Longwe

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis Longwe. Pendekatan analisis Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa disebut dengan Kriteria Pembangunan Perempuan (Women's Empowerment Criteria atau Women's Development Criteria), adalah suatu pendekatan analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang

⁴¹ ibid

meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.⁴² Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkhis. Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan.⁴³

- a. Dimensi Kesejahteraan, dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya.
- b. Dimensi Akses Kesenjangan Gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya.
- c. Dimensi Kesadaran Kritis Kesenjangan Gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku.

⁴² Handayani, 2002.

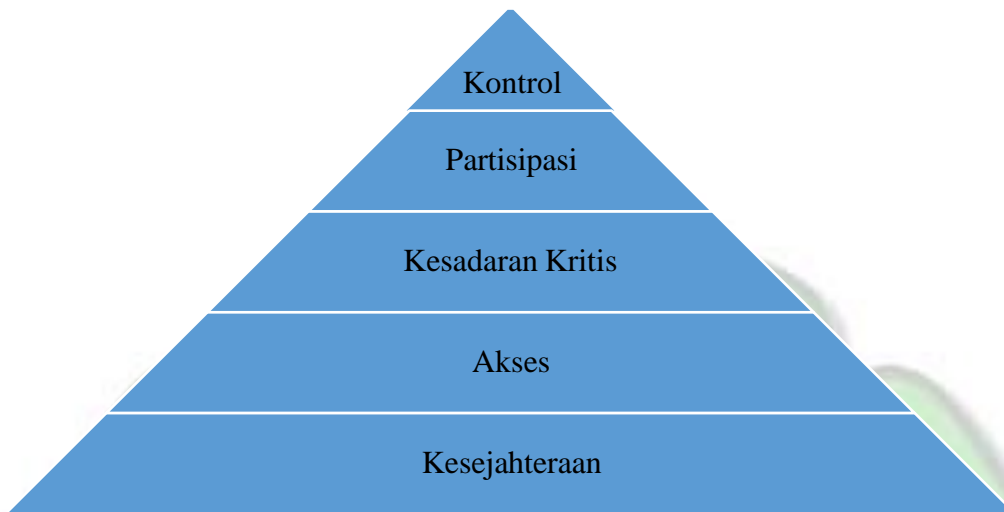
⁴³ Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press.

- d. Dimensi Partisipasi, Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Di sini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi.
- e. Dimensi Kuasa/Kontrol Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan mempunyai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan dalam kuasa merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan gender dan keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.

Lima dimensi pemberdayaan analisis gender perspektif Longwe dapat dilihat dalam bagan berikut :⁴⁴

⁴⁴ Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Handayani 2002.

Bagan 1. Piramida Analisis Longwe



Dalam pembahasan ini, lima dimensi pembangunan perempuan merupakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan sebagai akibat masih adanya sistem diskriminasi gender. Ketimpangan yang dimaksud di sini adalah mengenai 40 proses pemampuan perempuan, lebih khususnya adalah partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Melalui analisis gender perspektif Longwe, akan dapat diidentifikasi implikasi partisipasi perempuan sebagai anggota Tuha Peut dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru.⁴⁵

Kerangka Longwe berfokus langsung pada penciptaan situasi/pengkondisian di mana masalah kesenjangan, diskriminasi dan subordinasi diselesaikan. Longwe menciptakan jalan untuk mencapai tingkat pemberdayaan dan kesederajatan (*equality*) di mana ditunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar-praktis perempuan tidak pernah sama dengan, pemberdayaan maupun sederajat (*equal*). Pengambilan keputusan (kontrol) merupakan puncak dari pemberdayaan dan kesederajatan (*equality*). Table 2.1 memberikan gambaran jelas

mengenai hal ini. Dalam assessment proyek, kerangka Longwe bisa diturunkan menjadi dua alat:⁴⁶

1. Level kesederajatan (Equality level)

Tujuan utama alat ini adalah untuk menilai apakah sebuah proyek/program intervensi pembangunan mampu mempromosikan kesederajatan dan pemberdayaan perempuan atau tidak. Asumsi dasar dibalik alat ini adalah bahwa titik tercapainya kesederajatan (equality) antara perempuan dan laki-laki mengindikasikan level pemberdayaan perempuan. Ada lima level dalam aras kesederajatan dan pemberdayaan yang perlu dicermati. Bentuk ini, menurut saya, seolah mengikuti alur pikirnya Abraham Maslow tentang teori hierarki of human needs, dengan meletakan kebutuhan dasar-praktikal pada titik yang paling bawah dan kebutuhan "aktualisasi diri" sebagai kebutuhan tertinggi diterjemahkan sebagai "kontrol dan decision making". Tentunya, ilustrasi ini memiliki kelemahan dan terkesan dipaksakan.⁴⁷

⁴⁶ Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks) Jonatan A. Lassa, Coordinator Hivos Aceh.

Tabel 2.1.

Level kesederajatan dan pemberdayaan

	Equality		Pemberdayaan	
	Perempuan	Laki-laki	perempuan	Laki-laki
Kontrol (decision Making)	↑	↑	↑	↑
Partisipasi				
Kesadaran Kritis(conscenticiao)				
Akses				
Welfare (kebutuhan dasar-praktis)				

Anak panah di atas menunjukkan arah peningkatan menuju pemberdayaan dan equality. Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hirarkhis. Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan.⁴⁸

Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, baik kerja produktif, reproduktif, privat, maupun publik, dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal

sebagai “pemberdayaan”, atau lebih umum dikatakan sebagai *Gender and Development* terhadap perempuan dalam pembangunan.⁴⁹

2. Isu Spesifik Perempuan dengan tujuan pada pengenalan akan kebutuhan spesifik perempuan. Asumsi utamanya adalah bahwa semua isu perempuan berkaitan dengan equality dalam peran sosial dan ekonomis. Tiga level pengenalan atas isu perempuan di dalam proyek adalah NEGATIF, NETRAL & POSITIF. Sara Longwe berpendapat bahwa banyak literatur pengembangan meneliti tentang apa dan sejauh mana kesetaraan antara perempuan dan laki-laki telah dicapai sesuai dengan sector ekonomi dan masyarakat konvensional : kesetaraan dalam Pendidikan, lapangan kerja dan seterusnya. System ini menganalisis kesetaraan oleh sektor berkonsentrasi pada memisahkan bidang kehidupan sosial, bukan pada kesetaraan perempuan dalam proses pembangunan.⁵⁰

Dalam kerangka longwe, pembangunan berarti memampukan orang untuk mengambil alih hidup mereka sendiri, dan melarikan diri dari kemiskinan; kemiskinan di pandang sebagai yang timbul bukan karena kurangnya produktivitas, tetapi dari penindasan dan eksploitasi. Kerangka kerja longwe didasarkan pada gagasan tentang lima level yang berbeda persamaan. Sejauh mana ini hadir dalam bidang sosial atau kehidupan ekonomi menentukan tingkat pemberdayaan perempuan. The Longwe kerangka kerja juga memungkinkan pekerja gender dan pekerja pembangunan untuk menganalisis komitmen organisasi pembangunan terhadap kesetaraan perempuan dan pemberdayaan.⁵¹

Mereka melakukan ini terlebih dahulu dengan mengidentifikasi “tingkat kesetaraan” mana ditangani oleh intervensi tertentu, dan kedua dengan menilai tingkat mana pengakuan ‘masalah perempuan ada dalam tujuan proyek’. Itu juga mungkin untuk menghasilkan profil dari seluruh

⁴⁹ ibid

⁵⁰ Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks) Jonatan A. Lassa, Coordinator Hivos Aceh

program pengembangan, mengkategorikan proyek-proyeknya dalam hal tingkat kesetaraan yang mereka tangani, dan tingkat pengakuan mereka terhadap masalah perempuan. Ini mungkin bagian dari Latihan yang dilakukan oleh organisasi pengembangan besar yang ingin menilai seluruh program negaranya dari perspektif gender.⁵²

2.2 Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Indonesia pembahasan dan penyelesaian tentang wanita atau perempuan sama pentingnya dengan pembahasan dan penyelesaian di segala bidang. perempuan hanya dianggap sebagai subyek yang pekerjaannya sebagai konsumen penghabis gaji atau pendapatan yang diperoleh suami. Anggapan seperti tidak dapat dibenarkan, karena disadari perempuan juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji untuk mendapatkan alternatif pendapatan dan berprestasi. Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peran ganda perempuan dalam pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan. Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam bidang politik bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dapat dikatakan bahwa pra modernitas senantiasa diiringi dengan adanya proses pembangunan.⁵³

Pengertian proses pembangunan adalah perubahan sosial budaya yang akan meliputi pula perubahan nilai. Perempuan di samping sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami bekerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut menentukan kondisi

⁵² Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks) Jonatan A. Lassa, Coordinator Hivos Aceh.

⁵³ Soerdarsono dan Gatut Murniatmo, *Nilai Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan Pengkajian Proyek Penelitian Kebudayaan Nusantara Bagian Jawa, 1986

suami. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan syarat yang mutlak. Pergeseran dan peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi ketika seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan Negara. Di mana peran wanita tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Hal itu harus mendapatkan pengakuan yang positif dan pasti. Pembagian peran privat dan publik tidak relevan jika diterapkan dalam masyarakat Jawa, karena dalam masyarakat Jawa wanita sudah terbiasa dengan peran privat sekaligus publik. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat Jawa golongan petani dan pedagang, dimana wanita mengurus rumah tangga (domestic) sekaligus mencari nafkah (ekonomi publik). Pola pembagian privat dan publik sesungguhnya telah dipatahkan oleh ideologi produksi yang menganut paham fungsionalisme struktural. Paham ini mengatakan bahwa pembagian privat-publik berlawanan dengan ideologi produksi.⁵⁴

Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebabkan bahwa kaum perempuan hanya berhak mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki adalah orang yang berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan zaman kesetaraan gender dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki apalagi dalam hal perpolitikan dan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus).⁵⁵

2.2.1. Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Berbicara tentang perempuan, tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Pun di era emansipasi seperti sekarang,

⁵⁴ *ibid.*

⁵⁵ Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan dinilai hanya becus dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan. Salah satu contoh, peran perempuan di dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di sektor perikanan, data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan, perempuan mengerjakan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan waktu kerja hingga 17 jam. Mulai dari menyiapkan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, memasak bahan makanan untuk nelayan laki-laki. Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan kemudian berperan sebagai penjual atau pengupas kerang. Mereka juga ahli dalam mengolah ikan menjadi makanan siap saji, seperti tekwan, sambal, ataupun kerupuk sehingga harga jual produk ikan menjadi naik.⁵⁶

Demikian juga keterlibatan perempuan pada bidang-bidang lain, termasuk politik dan pemerintahan. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla pada 2014-2019, perempuan kian diberdayakan dengan ditetapkannya peraturan mengenai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Meskipun, dalam praktiknya, tidak semua perempuan yang berkecimpung di bidang politik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Namun setidaknya, mereka mampu merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah.⁵⁷

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah

⁵⁶ KEMENKO PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia)

⁵⁷ *ibid*

strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.⁵⁸

2.3 Konsep Gender

Gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan. Oleh karena dibentuk secara sosial budaya, maka gender bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, bersifat tetap, sehingga dapat diubah dari masa ke masa, berbeda untuk setiap kelas dan ras. Sebagai contoh, ketika tahu jenis kelamin anak yang dilahirkan, orang tua cenderung menyiapkan segala perlengkapan bayi sesuai jenis kelamin anak, misalnya pink untuk anak perempuan, biru untuk anak laki-laki. Sejak lahir, oleh budaya telah dilekatkan bahwa biru adalah warna untuk anak laki-laki, dan pink untuk anak perempuan. Selama ini, masyarakat di mana kita tinggal lah yang menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan gender, yang menentukan apa yang seharusnya membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan akan pembagian tersebut diwariskan secara turun temurun, melalui proses belajar di dalam keluarga dan masyarakat, melalui proses kesepakatan sosial, bahkan tidak jarang melalui proses dominasi. Artinya, proses sosialisasi konsep gender kadang dilakukan dengan cara halus maupun dalam bentuk indoktrinasi. Proses itu menuntut setiap orang (laki-laki dan perempuan) berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ketentuan sosial budaya di mana mereka tinggal. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial, kultural, melalui ajaran agama maupun negara.⁵⁹

Konsep gender juga menyebabkan terbentuknya stereotipe yang ditetapkan secara budaya atau hal yang umum tentang karakteristik gender yang spesifik, berupa karakteristik yang berpasangan yang dapat menggambarkan

⁵⁸ ibid

⁵⁹ Rostyaningsih, *Konsep Gender*, (Semarang: LPPM UNDIP, 2010)

perbedaan gender. Dapat dilihat bahwa hal itu dibentuk saling bertentangan, tetapi karakteristiknya saling berkaitan. Sebagai contoh, laki-laki adalah makhluk yang rasional, maka perempuan mempunyai karakteristik yang berlawanan yaitu tidak rasional atau emosional. Padahal sebenarnya, karakteristik atau sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, cerewet, lemah lembut, dan ada perempuan yang rasional, sombong, obyektif dan kuat. Perubahan karakteristik gender antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lain, dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Misalnya, pada suku tertentu (Amazon), perempuan lebih kuat dari laki-laki. Bahwa pengertian seks tidak sama dengan gender. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal. Sedangkan gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini kita sering mencampurkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (seks) dan tidak berubah, dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrat (gender) yang sebenarnya, bisa berubah atau diubah.⁶⁰

⁶⁰ ibid

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.⁶¹ Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori. Menurut Koyan, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik.⁶² Dengan kata lain penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia.⁶³ Dengan demikian, pendekatan penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komperatif, membandingkan 2 gampong yang ada keterwakilan tuha peut perempuan dengan 2 gampong yang tidak ada keterwakilan tuha peut perempuan. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah

⁶¹ Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 36

⁶² I Wayan Koyan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁶³ Furchan Arif, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) hlm 241.

berlangsung.⁶⁴ Berdasarkan pendapat tersebut penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan pengaruh keterwakilan perempuan sebagai tuha peut dalam pembangunan gampong di kecamatan jaya baru kota Banda Aceh dengan mencari data-data tentang keberadaan Tuha Peut dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh keterwakilan perempuan sebagai tuha peut dalam pembangunan gampong dan melihat bagaimana desa yang memiliki tuha peut perempuan dengan yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh Tuha Peut yang berada di Kecamatan Jaya Baru pada desa Lampoh Daya, Lamjamee, Emperom dan Geuceu Menara.

3.3 Lokasi Penelitian

Dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Jaya Baru maka peneliti mengambil di 4 desa, 2 desa yang tidak memiliki keterwakilan perempuan sebagai tuha peut yaitu desa Lampoh Daya dan Lamjamee. Selanjutnya 2 desa yang memiliki keterwakilan perempuan sebagai tuha peut yaitu desa Emperom dan Geuceu Menara. Alasan mengambil 4 desa ini adalah untuk membandingkan hasil data terhadap pembangunan di desa masing-masing yang memiliki keterwakilan tuha peut perempuan dengan yang tidak memiliki keterwakilan tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong di Kecamatan jaya Baru.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan mewawancarai dengan informan untuk menggali

⁶⁴ Sukmadinata, *Landasan Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 72.

informasi yaitu Keuchik, sekretaris, Tgk Imum, Tuha Peut Laki-laki, Tuha Peut Perempuan, dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini.

3.5 Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong Emperom	1
2	Keuchik Gampong Lamjamee	1
3	Keuchik Geucheu Meunara	1
4	Geuchik Lampoh Daya	1
5	Tuha Peut Perempuan Gampong Empesom	1
6	Tuha Peut Perempuan Geucheu Meunara	1
7	Masyarakat Perempuan Gampong Lamjamee	1
8	Masyarakat Perempuan Gampong Lampoh Daya	1
	Total	8

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh

gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap obyek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.⁶⁵ Peneliti akan melakukan pengamatan dengan mendatangi gampong, melihat langsung, dan mengamati setiap kegiatan yang ada melibatkan tuha peut perempuan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).⁶⁶ Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dan akan bertanya secara langsung bagaimana mereka melakukan aktivitas di gampong terkait dengan pembangunan gampong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Undang-undang/qanun, perwal/pergub, catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan data

⁶⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

⁶⁶ Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

penelitian ini. Dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.⁶⁷

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai, dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.⁶⁸

3) Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid

⁶⁸ Baswori & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

4.1.1. Profil Gampong Geuceu Meunara

Gampong Geuceu Meunara merupakan gampong yang terletak di sebelah Selatan kecamatan Jaya Baru dengan luas wilayah 63 Ha. Adapun batas-batas Gampong Geuceu Meunara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gp. Lamtemen Barat dan Geuceu Ineum
Sebelah Selatan : Gp. Garot Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat : Gp. Garot Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Timur : Gp. Gampong Geuceu Ineum dan Lam Ara

Gampong Geuceu Meunara mempunyai jumlah penduduk 3.902 Jiwa, yang tersebar dalam 3 Dusun dengan rincian tabel sebagai berikut ini:⁶⁹

Dusun Lhok Lanta	Dusun Tgk. Meunara	Dusun Pot Jambe
878 Jiwa	489 Jiwa	2535 Jiwa

Data rekap Gampong Geuceu Meunara

Tingkat pendidikan Masyarakat Gampong Geuceu Meunara adalah sebagai berikut:

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	S3
272 Jiwa	97 Jiwa	183 Jiwa	1.609 Jiwa	218 Jiwa	284 Jiwa	23 Jiwa	1 Jiwa

Data rekap Gampong Geuceu Meunara

Struktur Pemerintahan Gampong Geuceu mulai dari terbentuknya gampong sampai sekarang ialah sebagai berikut:

NO	Tahun	Keuchik
1	1986-1987	H. MUCTAR ZAMZAMI

2	1987-1990	M. ALI IBRAHIM
3	1990-2002	M. HASAN SULAIMAN
4	2002-2006	M. YACOB AR
5	2006-2011	M. ALI AFIFAN
6	2011-2018	Drs. IDRIS DALAMY

Data rekap Gampong Geucheu Meunara

4.1.2. Profil Gampong Lamjamee

a. Sejarah Gampong

Dari cerita historis tokoh-tokoh, Gampong Lamjamee sudah ada sejak tahun 1920 dimana pada masa itu Gampong Lamjamee berupa lahan kosong dan rawa-rawa.

Gampong Lamjamee sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Namun pada tahun 1987 Gampong Lamjamee masuk kedalam wilayah Kota Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Meuraxa. Sekitar tahun 2003 akibat terjadinya pemekaran wilayah di Kota Banda Aceh maka Gampong Lamjamee masuk kedalam wilayah Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Untuk nama “Gampong Lamjamee” sendiri berdasarkan cerita masyarakat secara bahasa berarti “LAM” = Tempat, “JAMEE” = Tamu/Pendatang. Jadi secara harfiah arti dari Gampong Lamjamee adalah tempatnya para tamu/pendatang yg menetap (domisili). Sehingga lahirlah sebutan nama gampong itu adalah Gampong Lamjamee. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gampong Lamjamee mulai membentuk Pemerintahan Gampong sendiri sekitar tahun 1985. Dgn datangnya perantau dari daerah lain yg hanya ada beberapa orang mereka menggarap lahan kosong tersebut menjadi lahan pertanian dan tambak. Dari informasi yg diperoleh tersebut bahwa dikuasai oleh beberapa orang dgn pembagian wilayah sebagai berikut.⁷⁰

⁴¹ RPJM Gampong Lamjamee

NO.	WILAYAH	DIKUASAI	KETERANGAN
1.	UTARA	M. SALEH	Sekarang menjadi Dusun Jathaleb
2.	SELATAN	M. AMIN	Sekarang menjadi Dusun Poteuraja
3.	TIMUR	M. ALI	Sekarang menjadi Dusun Diguri
4.	BARAT	NEK BIEK	Sekarang menjadi Dusun Lamkuta

Berdasarkan pemetaan pertanahan, tanah Gampong Lamjamee memiliki 2 status kepemilikan antara lain: milik perorangan dan milik adat terdiri dari tanah dan bangunan, tanah sawah, rawe-rawe, kebun kelapa dan lahan kosong (lahan hijau).

b. Demografi

Gampong Lamjamee merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Jaya Baru, yang terletak 1 Km ke arah Timur dari Kecamatan Jaya Baru, Gampong Lamjamee mempunyai luas wilayah seluas 145 Hektar. Adapun batas-batas wilayah Gampong Lamjamee:⁷¹

BATAS GAMPONG	
Sebelah Utara	: Berbatasan dgn Gampong Asoe Nanggreo
Sebelah Selatan	: Berbatasan dgn Gampong Paya Tieng
Sebelah Timur	: Berbatasan dgn Gampong Ulee Pata
Sebelah Barat	: Berbatasan dgn Gampong Bitai/Surien

Iklm Gampong Lamjamee, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan.

⁷¹ RPJM Gampong Lamjamee

Gampong Lamjamee terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Poteuraja, Dusun Diguri, Dusun Lmakuta, Dusun Jathaleb dengan jumlah penduduk **1.127** Jiwa atau **345** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut.⁷²

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	588
2.	Perempuan	539
3.	Kepala Keluarga	345

c. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Gampong Lamjamee dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:⁷³

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Thn – 17 Thn	438
2.	18 Thn – 55 Thn	625
3.	55 Thn ke atas	64
Jumlah		1.127

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan gampong akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut.⁷⁴

⁷² RPJM Gampong Lamjamee

⁷³ RPJM Gampong Lamjamee

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Taman Kanak-kanak	12
3.	Sekolah Dasar/Sederajat	44
4.	SMP/Sederajat	79
5.	SMA/Sederajat	389
6.	Akademi/D1-D3	55
7.	Sarjana S1	48
8.	Sarjana S2	5
9.	Sarjana S3	6

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Gampong Lamjamee sebagian besar lainnya. Data menurut mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut.⁷⁵

1. Karyawan:
 - a) PNS : 44 Orang
 - b) TNI/Polri : 54 Orang
 - c) Swasta/BUMN : 17 Orang
2. Wiraswasta/Pedagang : 17 Orang
3. Petani : 1 Orang
4. Nelayan : 6 Orang
5. Peternak : 1 Orang
6. Jasa : 8 Orang
7. Pensiunan : 11 Orang
8. Lainnya : 964 Orang
9. Tidak Bekerja/Pengangguran: 4 Orang

f. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Gampong Lamjamee. seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Majelis Ta'lim, Kepemudaan, BUMDES, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan gampong pada masyarakat.

g. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Gampong Lamjamee harian lepas. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banda Aceh. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan gampong adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Pendapatan Gampong merupakan jumlah keseluruhan penerimaan gampong yang dibukukan dalam APB Gampong setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Gampong Lamjamee Nomor 05 TAHUN 2020 bahwa Sumber Pendapatan Gampong:

1. Sumber Pendapatan Gampong

- a) Pendapatan asli gampong terdiri dari hasil kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli gampong yang sah;
- b) Bagi hasil pajak daerah Kota Banda Aceh untuk gampong dan dari retribusi Kota Banda Aceh sebagian diperuntukkan bagi gampong yang merupakan pembagian untuk setiap gampong secara proporsional;
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Banda Aceh untuk gampong yang

pembagiannya untuk setiap gampong secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah; dan
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas gampong;

3. Sumber Pendapatan Gampong yang telah dimiliki dan dikelola oleh gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun kekayaan gampong terdiri:

- a) Bangunan gampong yang dikelola gampong; dan
- b) Lain-lain kekayaan milik gampong.⁷⁶

4.1.3. Profil Gampong Lampoh Daya

a. Sejarah Gampong

Dari cerita historis tokoh-tokoh tua Gampong Lampoh Daya, sudah ada sejak tahun 1927 dimana pada masa itu Gampong Lampoh Daya masih belum terkenal luas, letak Gampong Lampoh Daya diapit oleh Gampong Bitai, Lamjamee dan Emperoom. Dalam cerita tersebut bahwa diantara apitan Gampong ada suatu lahan kosong (kebun) yang disebut-sebut (**Lampoh**), warga diantara ketiga Gampong ini berkebun dilahan kosong yang dinamakan Lompoh, dengan jerih payah dan upaya ("**Daya**") mereka bercocok tanam di kebun tersebut, sehingga para petani lambat laun telah menjadi penghuni di Lampoh tersebut untuk bercocok tanam. Maka diambillah kesepakatan untuk menjadi suatu Gampong yang dinamakan Gampong Lampoh Daya.⁷⁷

⁷⁶ RPJM Gampong Lamjamee

⁴⁶ RPJM Gampong Lampoh Daya

Disaat itu masih bernama Keresidenan Kuta Raja, kemudian menjadi Aceh Besar pada tahun 70an, dan sekitar tahun 80an terbentuk Kabupaten Aceh Besar, Gampong Lampoh Daya termasuk dalam Wilayah Kecamatan Peukan Bada. Sekitar Tahun 1986 Gampong Lampoh Daya beralih kepemilikan wilayahnya menjadi wilayah Kota Banda Aceh di bawah Wilayah Administratif Kecamatan Meuraxa kemudian menjadi Kecamatan Jaya Baru

Berdasarkan pemetaan pertanahan, tanah Gampong Lampoh Daya memiliki 2 status kepemilikan antara lain; milik dan milik adat terdiri dari tanah dan bangunan, tanah sawah, dan lahan kosong (lahan hijau).

Populasi penduduk setelah bencana tsunami pada tahun 2004 saat itu sangat cepat, pada tahun 2017 jumlah penduduk Gampong Lampoh Daya terdapat sekitar 541 Kepala Keluarga setelah pasca bencana Tsunami tahun 2004 kehidupan masyarakat mulai bangkit secara ekonomi

Pertumbuhan penduduk di Gampong Lampoh Daya terjadi setelah adanya perkawinan antar keluarga dan saudara, dimana masyarakat saat itu masih mengacu pada azas tuntunan agama.⁷⁸

b. Geografis

I. Letak dan Luas Wilayah

Gampong Lampoh Daya merupakan gampong yang terletak di sebelah utara Kecamatan Jaya Baru dengan luas wilayah 32,50Ha. Adapun batas-batas Gampong Lampoh Daya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Emperom
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Jamee
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lam Hasan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Bitai

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Lampoh Daya terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:

⁷⁸ RPJM Gampong Lampoh Daya

No	Dusun/Jurong	Luas Wilayah
1	Tgk Ismail	7,75 ha
2	K. Zam-zam	6,45 ha
3	Cot Turrahim	9,75 ha
4	K. Rahman	8, 55 ha
	Total	32,5 ha

c. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

I. Jumlah Penduduk

Gampong Lampoh Daya mempunyai jumlah penduduk 1868 Jiwa data bulan Desember 2017, yang tersebar dalam empat Dusun dengan Perincian tabel sebagai berikut ini:

Dusun Tgk Ismail (I) KK/Jiwa	Dusun K. Zamzam (II) KK/Jiwa	Dusun Cot Turrahim (III) KK/Jiwa	Dusun K. Rahman (IV) KK/Jiwa
116/398 Jiwa	135/447 Jiwa	105/356 Jiwa	185/667 Jiwa

II. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Lampoh Daya adalah sebagai berikut:

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana (S1)	S2
137 Jiwa	18 Jiwa	57 Jiwa	17 Jiwa	109 Jiwa	10 Jiwa

4.1.4. Profil Gampong Emperom

a. Sejarah Gampong

Dari cerita historis tokoh-tokoh, nama Emperom diberikan oleh pasukan Turki, yang diambil dari kata imparium yang berarti kerajaan/kekaisaran. Desa ini didirikan oleh pasukan Turki yang diutus ke Aceh untuk menyebarkan agama Islam setelah Khalifah Turki Usmani berhasil merebut Konstantinopel dari

tangan pasukan salib. Pasukan Turki ini dipimpin oleh Muthalib Gazi bin Mustafa Ghazi yang kemudian dikenal dengan nama Tengku Syeh Tuan Di Bitai.

Gampong Emperom merupakan gampong yang berada 3 Km dari pinggiran terusan laut Ulee Lheeyang terhubung dari satu gampong ke gampong lainnya dan sepanjang batas bibir gampong dibatasi dengan sungai. Gampong Emperom memiliki luas 54 Ha berbatasan dengan

- a. Sebelah Utara : Gampong Lampoh Daya dan Gampong Bitai
- b. Sebelah Timur : Gampong Lamtemen Timur
- c. Sebelah Barat : Gampong Lampoh Daya dan Gampong Ajun
- d. Sebelah Selatan : Gampong Lamtemen Barat dan Geucheu Meunara

Gampong Emperom terdiri dari 4 Dusun yaitu :

- a. Dusun Bungong Seulanga
- b. Dusun Bungong Meulu
- c. Dusun Bungong Jeumpa
- d. Dusun Bungong Teubee ⁷⁹

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk

Dusun Bungong Seulanga	Dusun Bungong Jeumpa	Dusun Bungong Meuleu	Dusun Bungong Teubee
420 Jiwa	375 Jiwa	725 Jiwa	1531 Jiwa

Data RPJM Gampong Emperom

Tingkat Pendidikan

Pra sekolah	SD	SMP	SMA	S1	S2
213 Jiwa	538 Jiwa	211 Jiwa	167 Jiwa	200 Jiwa	55 Jiwa

Data RPJM Gampong Emperom

⁷⁹ Data RPJM Gampong Emperom

4.2. Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

4.2.1. Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Geucheu Meunara

Untuk melihat keterwakilan anggota Tuha Peut Perempuan dalam pembangunan suatu gampong dapat diukur dari bentuk-bentuk keterlibatan anggota tuha peut perempuan tersebut di pemerintahan gampong. Seperti perempuan sudah mulai dilibatkan dalam pemerintahan gampong sehingga suara perempuan dapat terwakilkan. Dalam hal melibatkan perwakilan perempuan dalam pemerintahan diatur dalam qanun. Dimana perempuan harus dilibatkan dalam Tuha Peut yang mana keterwakilannya harus mencapai 30 persen. Seperti yang diungkapkan oleh Geuchik Gampong Geucheu Meunara bahwa gampong tersebut sudah menjalankan aturan tersebut dengan menempatkan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut sebagai bentuk keterwakilan perempuan di pemerintahan gampong. Dalam wawancaranya Geuchik Geucheu Meunara mengungkapkan:

Kami menempatkan anggota perempuan dalam Tuha Peut di gampong ini dimana ada 9 orang 4 perempuan 5 laki-laki. Kami menjalankan sepenuhnya seperti yang diperintahkan dalam qanun dimana harus ada keterwakilan perempuan dalam pemerinatahn gampong. Jadi ini sebagai salah satu bentuk keterwakilan perempuan di gampong kami.⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk keterwakilan perempuan dalam pembangunan gampong di Gampong Geucheu Meunara ialah dengan melibatkan perempuan dalam pemerintahan gampong seperti yang diamanahkan oleh qanun. Dimana saat ini di gampong tersebut telah menempatkan 4 keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan Tuha Peut.

⁸⁰ Wawancara dengan Geuchik Gampong Geucheu Meunara pada tanggal 27 September 2021 di Gampong Geucheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Hal serupa juga dikatakan oleh Tuha Peut Gampong Geucheu Meunara bahwa dengan adanya qanun tersebut pihak perempuan dapat lebih leluasa untuk terlibat dalam pemerintahan gampong. Keadaan sekarang tidak seperti dulu sebelum adanya qanun para perempuan sangat dibatasi bahkan tidak diizinkan untuk terlibat dalam pemerintahan gampong. Saat ini para perempuan sudah di Gampong Geucheu Meunara sudah bisa mewakili suaranya kepada perwakilan mereka di keanggotaan Tuha Peut perempuan. Dengan begitu segala permasalahan terkait dengan perempuan akan diurus oleh perwakilan Tuha Peut Perempuan. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Saat ini kami para perempuan sudah dilibatkan dalam pemerintahan gampong. Dimana kami sudah di tempatkan dalam keanggotaan Tuha Peut. Dengan begitu kami lebih leluasa untuk membangun gampong yang pro terhadap perempuan. Karena tidak hanya laki-laki saja yang harus dipenuhi kebutuhannya perempuan juga harus terpenuhi segala kebutuhannya. Dengan adanya keterwakilan para perempuan di keanggotaan Tuha Peut dapat memberikan kontrol penuh kepada kami untuk mengurus setiap permasalahan yang berkaitan dengan perempuan.⁸¹

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa saat ini di Gampong Geucheu Meunara sudah melibatkan perempuan dalam pemerintahan gampong. Sehingga suara perempuan sudah terwakilkan secara regulasi. Dengan adanya keanggotaan Tuha Peut Perempuan dapat memberikan harapan baru kepada perempuan dimana kebutuhan perempuan dapat terpenuhi sebagaimana layaknya kebutuhan laki-laki terpenuhi. Selain itu dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi kepada perempuan secara leluasa.

Kemudian Geuchik Gampong Geucheu Meunara juga mengatakan bahwa bentuk keterwakilan perempuan di gampong Geucheu Meunara dalam pembangunan gampong dapat juga dilihat dari keaktifan perempuan itu sendiri dalam memberikan saran ide-ide dan kritikan terhadap setiap isu yang ada di gampong. Seperti Gampong Geucheu Meunara ini banyak permasalahan KDRT yang korbannya itu perempuan. Para pihak anggota perempuan Tuha Peut ini

⁸¹ Wawancara dengan anggota Tuha Peut Perempuan Gampong Geucheu Meunara pada tanggal 27 September 2021 di Gampong Geucheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

akhirnya mengusulkan untuk membentuk kelompok anti kekerasan. Dimana nantinya kelompok ini akan jadi tempat mediasi para korban kekerasan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa hanya perempuan yang mengerti perempuan. Jadi perempuan ini akan terbuka hanya kepada perempuan. Hal ini diungkapkan Geuchik Geucheu Meunara dalam wawancaranya:

Untuk gampong ini bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan sangat aktif seperti ada kelompok anti kekerasan terhadap perempuan, ada kelompok anti kekerasan terhadap anak. jadi perempuan lebih mudah berbicara sesama perempuan. Seperti yang kita tahu kekerasan itu banyak korbannya perempuan, jadi dengan adanya kelompok tersebut dapat melakukan mediasi sesama yang nantinya melahirkan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.⁸²

Dapat dilihat berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong di Gampong Geucheu Meunara dapat dilihat dari keaktifan anggotanya dalam memberi saran, ide, dan kritikan. Dimana dengan adanya keterwakilan tuha peut perempuan lahirlah kelompok anti kekerasan di gampong yang fungsinya dapat menyelesaikan dan memberi solusi terhadap permasalahan KDRT yang terjadi di gampong tersebut yang mana korbannya adalah seing terjadi kepada perempuan.

Selanjutnya menurut anggota Tuha Peut perempuan bahwa anggotanya sangat aktif dalam memberi ide dan saran disetiap musyawarah yang dilakukan di gampong. Mereka sebisa mungkin memperjuangkan nasib perempuan di gampong. Jadi bentuk keterwakilan tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong dapat dilihat dari memperjuangkan nasib perempuan dimana segala kebutuhan perempuan harus terpenuhi dalam segi apapun. Hal ini sesuai dengan wawancaranya:

Kami anggota tuha peut perempuan di gampong ini saat aktif dalam memberi masukan dan ide disetiap musyawarah gampong dilaksanakan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk menyarankan segala kebutuhan perempuan di gampong. Jadi jika ditanya bentuk keterwakilan kami dalam pembangunan gampong dapat dilihat salah satunya memberi ide, saran dan

⁸² Wawancara dengan Geuchik Gampong Geucheu Meunara pada tanggal 27 September 2021 di Gampong Geucheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

*kritikan kritikan kepada kepala desa untuk terus memandang kami perempuan jangan dianggap tidak ada. Dengan adanya kami maka suara perempuan terwakikan dan didengar.*⁸³

Bedasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa anggota tuha peut perempuan sangat aktif dalam memperjuangkan suara perempuan di gampong. Jadi dapat dilihat salah satu bentuk keterlibatan anggota tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong dengan cara memberi masukan, ide kan kritikan yang dapat memberikan dampak terhadap masyarakat perempuan di gampong. Dengan adanya perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut dapat mewakikan suara perempuan dan lebih didengar.

Jadi jika dikaitkan dengan pada landasan teori Gender Perspektif Longwe, penulis melihat bahwa bentuk keterlibatan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong di Gampong Geucheu Meunara jika dilihat dari segi Dimensi Partisipasi perempuan berpartisipasi aktif dan sudah mampu berpartisipasi secara optimal dimana control perempuan dalam akses masuk dalam pemerintahan sudah dapat dijangkau oleh perempuan. Dengan begitu perempuan akan lebih leluasa untuk membangun gampong yang berpihak kepada perempuan. perempuan juga sudah aktif memberikan masukan ide dan kritikan di gampong. Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi.

Kemudian jika merujuk pada tingkat kesederajatan yang dirumuskan oleh teori perspektif longwe, bentuk keterlibatan anggota Tuha Peut Perempuan dalam pembangunan gampong di Gampong Geucheu Meunara cukup baik dimana sudah didapati kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan terlibatnya perempuan di keanggotaan Tuha Peut. Dimana perempuan di

⁸³ Wawancara dengan anggota Tuha Peut Perempuan Gampong Geucheu Meunara pada tanggal 27 September 2021 di Gampong Geucheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

pemerintahan gampong sudah mengambil porsi sebanyak 4 perempuan dari 9 keanggotaan perempuan di Tuha peut. Ini menandakan perempuan mampu berpartisipasi dengan baik.

4.2.2. Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Emperom

Untuk melihat bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut Perempuan dalam pembangunan gampong di Gampong Emperom dapat dilihat dari ada tidaknya perempuan terlibat dalam keanggotaan Tuha Peut. Untuk Gampong Emperom perempuan sudah ikut terlibat dalam keanggotaan Tuha Peut. Dimana pemerintah gampong sudah meaksanakan amanat qanun yang mengharuskan melibatakan perempuan sebanyak 30 persen dalam pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah Gampong menempatkan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut sebanyak 4 orang dari 9 keanggotaan Tuha Peut. Ini merupakan salah satu bentuk dari keterwakilan keanggotaan perempuan di Tuha Peut. Dengan demikian perempuan akan lebih leluasa terlibat dalam pembangunan gampong seperti yang diharapkan oleh perempuan. Paling tidak kebutuhan perempuan terpenuhi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Geuchik Gampong Empesom dalam wawancaranya:

*Landasan kita yang paling utama karena ada peraturannya dimana harus ada perempuan dalam pemerintahan dimana 30 persennya harus ada perempuan salah satunya di tuha peut tersebut. Berdasarkan peraturan itu maka perempuan ikut dilibatkan dalam tuha peut. Ini merupakan salah satu bentuk dari keterlibatan tuha peut perempuan dalam tuha peut yang nantinya dapat memberi efek terhadap pembangunan gampong seperti yang diharapkan oleh para perempuan.*⁸⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan anggota tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong dapat dilihat dari sudah adanya perempuan dalam Tuha Peut tersebut. Dimana akan

⁸⁴ Wawancara dengan Geuchik Gampong Emperom pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

mampu membawa dampak perubahan terhadap nasib perempuan dengan adanya keterwakilan suara perempuan di pemerintahan gampong.

Lebih lanjut Geuchik Gampong Emperom menjelaskan bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong dapat dilihat dari kepedulian perempuan tersebut terhadap kesejahteraan perempuan dalam gampong. Seperti ada kelompok peduli perempuan dimana kelompok ini menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan perempuan. Contohnya kasus KDRT kasus-kasus seperti itu anggota tuha peut perempuan akan bergerak untuk mencari solusi terbaik supaya terselesaikan masalah tersebut. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Jika ditanya bentuk keterwakilan anggota tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong dapat dilihat dari kepedulian perempuan itu sendiri. Sebenarnya dengan mau terlibat saja itu sudah menjadi salah satu bentuk keterwakilan dalam pembangunan gampong karena tidak ada yang mewakili suara perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri. Selain itu adanya ide dan saran-saran yang di berikan juga bagian dari bentuk keterlibatan mereka dalam pembangunan gampong ini. Contoh kepedulian mereka dapat dilihat dari adanya kelompok peduli perempuan. Kelompok ini hadir untuk membela dan mediasi para perempuan korban KDRT. Jadi bisa dikatakan itu bagian dari bentuk keterwakilan keanggotaan Tuha Peut Perempuan dalam pembangunan gampong.⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari keterlibatan keanggotaan Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong dapat ditinjau dari kepedulian perempuan dalam menentukan nasib perempuan sendiri. Dimana perempuan sadar bahwa suara mereka akan terwakili hanya apabila ada perwakilan perempuan di dalam pemerintahan. Oleh karena itu perempuan ikut terlibat dalam keanggotaan Tuha Peut dan aktif memberi masukan dan ide-ide yang mendukung kesejahteraan perempuan. Salah satu bentuk kepedulian perempuan dengan dibentuknya kelompok peduli perempuan yang mana kelompok ini akan menjadi tempat mengadu dan pemecah masalah yang

⁸⁵ Wawancara dengan Geuchik Gampong Emperom pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

dihadapi oleh para perempuan di gampong. Dengan adanya kelompok tersebut diharapkan perempuan tidak perlu resah saat menghadapi suatu masalah.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Tuha Peut perempuan Gampong Emperom. Beliau mengatakan bahwa kehadiran perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut merupakan salah satu bentuk keterwakilan perempuan dalam pembangunan gampong. Dimana perempuan merupakan salah satu unsur dari gampong mereka juga berhak sejahtera dan kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan perempuan maka harus ada yang mewakili suara perempuan. Oleh karena itu visi misi beliau menjadi Tuha Peut perempuan ingin mewakili suara perempuan selain itu dengan adanya perempuan di Tuha Peut dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh perempuan. Salah satu bentuk kepedulian dan menjamin kesejahteraan terhadap perempuan pihak tuha peut perempuan membentuk kelompok peduli perempuan. Kehadiran kelompok ini tidak lain untuk menjadi tempat mengadu dan pemecah masalah yang dihadapi oleh perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Tuha peut perempuan dalam wawancaranya:

*Kehadiran perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut merupakan salah satu bentuk keterwakilan perempuan dalam pembangunan gampong. Dimana perempuan merupakan salah satu unsur dari gampong mereka juga berhak sejahtera dan kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan perempuan maka harus ada yang mewakili suara perempuan. Oleh karena itu visi misi saya menjadi Tuha Peut perempuan ingin mewakili suara perempuan selain itu dengan adanya perempuan di Tuha Peut dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh perempuan. Salah satu bentuk kepedulian dan menjamin kesejahteraan terhadap perempuan pihak tuha peut perempuan membentuk kelompok peduli perempuan. Kehadiran kelompok ini untuk menjadi tempat mengadu dan pemecah masalah yang dihadapi oleh perempuan-perempuan gampong. Contohnya kasus kekerasan yang selalu perempuan korbannya. Dengan kehadiran kelompok ini akan mampu menjadi tempat mengadu bagi perempuan. Jadi bentuk keterlibatan tuha peut perempuan mampu terlibat dalam pembuatan kebijakan.*⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan anggota Tuha Peut perempuan Gampong Emperom pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Berdasarkan paparan wawancara di atas menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut dan mampu membentuk kelompok peduli perempuan dapat digambarkan sebagai salah satu bentuk keterwakilan tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong. Dengan adanya kelompok tersebut dapat memberi dampak baik kepada perempuan-perempuan gampong yang terlibat dalam permasalahan. Para perempuan menemukan tempat mengadu dan menjadi pemecah dari setiap permasalahan yang timbul. Misalnya kasus kekerasan yang korbannya perempuan dapat meminta bantuan kepada kelompok peduli perempuan ini. Dengan begitu perempuan tidak perlu khawatir tidak ada tempat untuk mengadu.

Kemudian jika merujuk pada teori perubahan sosial yang dirumuskan oleh Kingsley Davis memberikan definisi perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. dari pengertian diatas terpaparkan perubahan sosial itu yang berubah adalah pada struktur dan sistem sosialnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bentuk keterwakilan perempuan dalam anggota Tuha Peut terhadap pembangunan gampong di Gampong Empesom sudah mampu merubah struktur kelembagaan dan sistem sosial. Dimana dalam struktur pemerintahan perempuan sudah dilibatkan dan dalam sistem sosial perempuan dapat memperoleh segala haknya. Selain itu tuha peut perempuan Gampong Empesom mampu mendobrak kebiasaan lama yang mengucilkan perempuan. Ini menandakan bahwa keterlibatan tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong sudah optimal.

Lebih jauh lagi jika ditinjau dari teori yang dirumuskan oleh Longwe dari dimensi Kuasa/Kontrol Kesenjangan Gender penulis melihat perempuan Gampong Empesom sudah mampu menyetarakan kekuasaan antara perempuan dan lelaki. Ini terlihat saat perempuan berhasil mengambil porsi 4 kursi anggota Tuha Peut dari 9 kursi yang tersedia. Ini menandakan bahwa kesetaraan dalam kuasa mampu diimbangi oleh anggota Tuha Peut perempuan yang kemudian mampu berperan dalam pembangunan di gampong. Seperti yang dijelaskan oleh Longwe bahwa Dimensi Kuasa/Kontrol Kesenjangan Gender terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah

tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan mempunyai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan dalam kuasa merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan gender dan keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.

4.2.3. Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Lamjamee.

Pada pemerintahan Gampong Lamjamee perempuan sama sekali tidak dilibatkan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan gampong-gampong lain yang ada di Kecamatan Jaya Baru dimana gampong lain menempatkan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut. Namun untuk Gampong Lamjamee tidak ikut melibatkan serta perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut dengan alasan dalam musyawarah yang dilakukan sementara pihak gampong memutuskan untuk tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut. Ini dikarenakan seringnya diadakan rapat pada malam hari sehingga perempuan tidak dapat berhadir. Akan tetapi karena ini aturan untuk tahun depan akan di usahakan melibatkan perempuan dalam tuha peut. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Geuchik Lamjamee dalam wawancaranya:

Kami tau ada qanun yang mengharuskan melibatkan perempuan dalam pemerintahan namun dalam musyawarah sementara kami tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut. Ini di karenakan seringnya diadakan rapat pada malam hari sehingga perempuan tidak dapat berhadir. Akan tetapi karena ini aturan untuk tahun depan akan kami usahakan melibatkan perempuan dalam tuha peut.⁸⁷

⁵⁸ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Gampong Lamjamee sama sekali tidak melibatkan perempuan dalam pemerintahan gampong. Perempuan tidak diikutsertakan dengan alasan klasik bahwa perempuan akan merasa berat untuk ikut rapat di malam hari dan hal itu masih dianggap tabu. Oleh karena itu perempuan Gampong Lamjamee tidak memiliki perwakilan perempuan dalam Tuha Peut.

Alasan lain untuk tidak melibatkan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut tidak lain karena kebudayaan lokal Gampong Lamjamee. Dimana perempuan dianggap tidak mampu memimpin ataupun menyelesaikan masalah dengan baik dan pemimpin perempuan itu dianggap tabu dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Geuchik Gampong Lamjamee dalam wawancaranya:

*Alasan lain Gampong Lamjamee tidak melibatkan perempuan karena kita kan adat ke Acehan, sedikit susah melibatkan perempuan, tuha peut itu sama dengan geuchik sebagai pemimpin. Masa laki-laki di pimpin oleh perempuan terlihat aneh kan. Selama kita laki-laki masih mampu mengatasi semua permasalahan yang timbul baik permasalahan perempuan dan laki-laki kami akan terus menggunakan laki-laki sebagai pemimpin.*⁸⁸

Dari Wawancara di atas dapat dilihat bahwa kebudayaan yang dilestarikan di Gampong Lamjamee tidak memungkinkan untuk perempuan masuk dalam pemerintahan walaupun sudah ada qanun yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Dapat dilihat juga bahwa kehadiran perempuan dalam pemerintahan sangat tidak diterima dan dianggap tabu oleh masyarakat gampong tersebut.

Selanjutnya Geuchik Gampong Lamjamee mengatakan bahwa tidak terlibatnya perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut bukan berarti pemerintah gampong bias terhadap perempuan ini dapat dibuktikan dengan setiap kegiatan yang pro perempuan masih dilaksanakan. Seperti kegiatan ibu PKK, dan kegiatan-kegiatan lainnya tetap dilaksanakan dan bahkan acara-acara adat pada pernikahan masih ditangani oleh perempuan hanya saja tidak dilibatkan dalam pemerintahan

⁵⁹ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

saja. Hal ini diungkapkan oleh Geuchik Gampong Lamjamee dalam wawancaramya:

Walaupun perempuan tidak dilibatkan dalam tuha peut bukan berarti kegiatan yang pro perempuan tidak ada misalkan seperti acara ibu ibu PKK tetap jalan seperti biasa dan kegiatan-kegiatan lainnya tetap dilaksanakan dan bahkan acara-acara adat pada pernikahan masih ditangani oleh perempuan hanya saja tidak dilibatkan dalam pemerintahan saja.⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam keanggotaan Tuha peut bukan berarti kebutuhan dan kegiatan yang pro perempuan tidak dilaksanakan lagi. Akan tetapi tetap dilaksanakan dan tetap diadakan. Contohnya dapat dilihat acara ibu-ibu PKK tetap berjalan sebagaimana mestinya dan kegiatan adat-istiadat juga masih ditangani oleh perempuan hanya saja perempuan tidak dilibatkan dalam pemerintahan.

Kemudian menurut Geuchik Gampong Lamjamee.

Kemudian pemerintah Gampong Lamjamee dalam upaya pemenuhan hak perempuan pihaknya mengundang perempuan ke kantor setiap sebulan sekali minimal untuk meminta saran dan pendapat serta keinginan mereka untuk dipenuhi oleh pihak pemerintah Gampong. Seperti para ibu-ibu PKK meminta anggaran untuk kelompok fardu kifayah yang dilaksanakan 3 bulan sekali dan anggaran posyandu yang dilaksanakan 1 bulan sekali tidak luput juga anggaran untuk kelompok menjahit. Jadi menurut Geuchik Gampong Lamjamee walaupun perempuan tidak dilibatkan dalam keanggotaan Tuha peut akan tetapi suara perempuan tetap didengar dan kegiatan perempuan tetap dilaksanakan. Terlebih geuchik merasa yakin bahwa dapat memenuhi semua kebutuhan perempuan walaupun tidak ada keterwakilan perempuan di Tuha Peut. Maka karena itu perempuan dirasa tidak perlu dilibatkan dalam pemerintahan gampong. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Geuchik Gampong Lamjamee dalam wawancaranya:

⁶⁰ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Sebenarnya jika ditanya bentuk keterwakilan Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong tidak ada. Akan tetapi bukan berarti perempuan tidak ikut terlibat dalam pembangunan gampong. Kami tetap melibatkan perempuan dalam pembangunan gampong. Kami juga tau perempuan juga bagian dari masyarakat kami. Namun untuk memenuhi kebutuhan perempuan saya rasa tidak harus melibatkan perempuan dalam pemerintahan karena buktinya tidak ada perempuan tapi kebutuhannya terpenuhi. Contoh kegiatan PKK jalan, ibu ibu PKK minta anggaran fardu kifayah kami anggarkan untuk fardu kifayah kami laksanakan 3 bulan sekali, mereka minta anggaran posyandu kami anggarkan untuk posyandu kami laksanakan 1 bulan sekali, mereka minta anggaran untuk kelompok menjahit kami anggarkan juga. Jadi kami sangat mendengar suara perempuan dan kami juga mengundang perempuan untuk hadir ke kantor setiap 1 bulan sekali untuk mendengar pendapat dan keinginan mereka. Ini juga bentuk melibatkan perempuan dalam pembangunan gampong menurut saya.⁹⁰

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa suara perempuan tetap didengar oleh pemerintah gampong walaupun perempuan tidak dilibatkan dalam keanggotaan Tuha Peut. Perempuan dirasa tidak perlu dilibatkan dalam pemerintahan hanya untuk didengar suaranya. Tanpa perwakilan perempuanpun semua kebutuhan dan keinginan perempuan akan mampu dipenuhi oleh pemerintah gampong.

Namun sangat berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat perempuan Gampong Lamjamee beliau mengatakan bahwa mereka bukan tidak ingin terlibat dalam pemerinatahan gampong hanya saja tidak ada dorongan dari Geuchik dan tokoh masyarakat lainnya untuk bergabung dalam keanggotaan Tuha Peut. Padahal beliau tahu bahwa dalam pemerintahan wajib melibatkan perempuan sebanyak 30 persen. Namun dalam musyarawarh gampong perempuan diminta untuk tidak terlibat. Ini sebenarnya sudah melanggar aturan, namun apableh buat saat perangkat gampong sudah mengambil keputusan tidak bisa diganggugat lagi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota PKK dalam wawancaranya:

⁹⁰ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Sebenarnya kami juga ada keinginan untuk bergabung dalam pemerintahan gampong. Bahkan kami juga tahu tentang aturan yang mengharuskan perempuan terlibat sebanyak 30 persen dalam pemerintahan. Namun dalam musyawarah gampong yang diadakan para perempuan diminta untuk tidak dilibatkan saja dengan alasan perempuan susah keluar jika diadakan rapat di malam hari. Kami juga tidak mendapat dukungan dari pihak tokoh-tokoh gampong. Jadi mau tidak mau harus menerima keputusan tersebut.⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa ruang gerak perempuan sangat dibatasi. Perempuan bukan tidak mau ikut dalam pemerintahan gampong akan tetapi kondisi dan situasi di gampong tersebut tidak mendukung perempuan untuk menjadi anggota di Tuha Peut. Dengan alasan perempuan sulit diajak saat ada rapat di malam hari. Budaya tersebut masih terlestarikan di gampong tersebut sehingga kehadiran perempuan dalam pembangunan gampong terkucilkan.

Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa dengan tidak adanya keterwakilan suara perempuan di keanggotaan Tuha Peut membuat banyak sekali kebutuhan perempuan tidak terpenuhi. Sehingga perempuan dianggap tidak sejahtera. Salah satunya tidak ada kelompok khusus yang terbentuk untuk melindungi perempuan terhadap tindakan kekerasan. Perempuan merasa tidak ada tempat untuk mengadu nasib mereka. Selain itu tidak ada pembangunan fisik yang mendukung kegiatan perempuan seperti tidak jelasnya gedung PKK. Jadi rapat ibu PKK pindah-pindah menyesuaikan ini sangat menyulitkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan salah satu ibu PKK dalam wawancaranya:

Sebenarnya dengan tidak adanya keterwakilan perempuan sangat menyiksa kami perempuan karena laki-laki ini tidak sepenuhnya paham akan kebutuhan dan keinginan kami. Bahkan sering kali yang kami minta itu tidak didengar. Salah satunya belum ada gedung PKK, tempat posyandu pun masih di meunasah seharusnya kana da gedung sendiri jadi tidak terganggu dengan kegiatan lain. Belum lagi kami tidak ada itu kelompok peduli perempuan seperti di desa lain. Jadi kami tidak ada tempat untuk mengadu kalau ada terjadi KDRT ataupun kekerasan terhadap kami para perempuan. Seandainya ada perwakilan perempuan

⁶² Wawancara dengan perwakilan PKK Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

*saya rasa hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Menurut saya kesejahteraan kami perempuan masih dipertanyakan.*⁹²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Budaya yang ada di gampong tersebut masih mengucilkan perempuan. Tidak adanya perwakilan perempuan sangat memberi dampak buruk terhadap perempuan. Ini terlihat nyata saat kebutuhan perempuan tidak mampu dipenuhi secara optimal oleh pemerintah gampong yang notabennya diisi oleh laki-laki.

Jika penulis kaitkan dengan teori yang dirumuskan oleh Longwe dari dimensi kesenjangan gender dapat dilihat perempuan Gampong Lamjamee belum mendapati kesetaraan gender dimana perempuan Gampong tersebut belum mampu mengakses dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan. Menurut Longwe Kesenjangan Gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya. Kemudian jika dilihat lebih jauh lagi dari segi Kesadaran Kritis Kesenjangan Gender terlihat bahwa perempuan sangat terdiskriminasi dimana perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam perwakilan pemerintahan Gampong dengan alasan perempuan dianggap tabu jika dilibatkan. Kesadaran Kritis Kesenjangan Gender menurut Longwe disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku.

⁹² Wawancara dengan perwakilan PKK Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

4.2.4. Bentuk Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Lampoh Daya

Gambaran situasi dan kondisi di Gampong Lampoh Daya juga tidak jauh berbeda dari Gampong Lamjamee. Dimana pemerintah gampong tersebut sepakat untuk tidak melibatkan perempuan dalam pemerintahan gampong atau biasanya dilibatkan dalam keanggotaan Tuha Peut walaupun mereka tahu bahwa ada kewajiban untuk melibatkan perempuan. Alasan tidak melibatkan perempuan karena perempuan dianggap kurang efektif bekerja dalam pemerintahan. Selain itu masih tabu juga di masyarakat oleh karena itu perempuan tidak dilibatkan dalam keanggotaan Tuha Peut saat ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Geuchik Lampoh Daya dalam wawancaranya:

Benar ada qanun yang mengatur tentang keharusan melibatkan perempuan dalam pemerintahan di gampong. Jadi dengan ada qanun tersebut perempuan tidak akan merasa terpinggirkan dan kesetaraan gender akan didapatkan dengan adanya qanun tersebut. Akan tetapi bukan tanpa alasan yang jelas kami tidak melibatkan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut kami menimbang semua masukan dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat gampong ini masih menganggap tabu jika perempuan dilibatkan dan perempuan dianggap tidak efektif dalam bekerja di pemerintahan. Contohnya ada rapat malam perempuan tidak bisa berhadir. Dan kurang etis juga perempuan bergabung dengan laki-laki kurang enak dipandang.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan untuk terlibat dalam ruang public sangat terbatas. Budaya dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap ketidakmampuan perempuan dan anggapan tidak etis jika perempuan ikut bekerja menjadi alasan perempuan tidak bebas dalam berekspresi. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan gampong. Sehingga tidak ada keterwakilan dan pembangunan yang melibatkan perempuan.

Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan perempuan Geuchik Gampong Lampoh Daya meyakini bahwa mampu memenuhi setiap kebutuhan perempuan

⁶⁴ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

walaupun tidak ada perwakilan perempuan di pemerintahannya. Beliau sangat percaya diri bahwa selama ini seluruh keperluan perempuan sudah dipenuhi. Seperti acara PKK tetap terlaksana, adanya anggota terhadap kelompok menjahit juga salah satu bukti kemampuannya dalam memenuhi keperluan perempuan dan melibatkan perempuan dalam pembangunan gampong tidak harus ada perempuan dalam pemerintahan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Geuchik Gampong Lampoh Daya dalam wawancaranya:

Di gampong ini untuk mewakilkan suara perempuan ataupun memenuhi kebutuhan perempuan selalu kami undang ibu-ibu ke kantor untuk menanyakan apa yang mereka butuhkan. Nanti akan kami anggarkan, seperti biasanya ibu-ibu ada fardu kifayah, minta mesin jahit itu kami anggarkan. Jadi walaupun tidak ada keterwakilan perempuan kami tetap berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan di gampong ini. Contohnya PKK juga jalan kok. Jadi walaupun tidak ada perempuan bukan berarti kami tidak peduli perempuan dan saya percaya bahwa selama ini seluruh keperluan perempuan sudah dipenuhi dan menueut saya melibatkan perempuan dalam pembangunan gampong tidak harus ada perempuan dalam pemerintahan. Misalnya perempuan buat kelompok menjahit, kelompok kue itu kan juga bagian membentuk kemandirian perempuan yang artinya juga melibatkan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dan pembangunan gampong yang mandiri.⁹⁴

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa perempuan Gampong Lampoh Daya tidak dilibatkan dalam pemerintahan gampong yang mana tidak ada keterwakilan perempuan dalam pemerintahan bukan berarti kegiatan yang melibatkan perempuan tidak dilaksanakan lagi. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perempuan tetap akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan keinginan perempuan. Namun untuk ikut serta dalam mewakili suara perempuan dalam pemerintahan tidak dilibatkan. Pemerinatahn dijalankan sepenuhnya oleh laki-laki.

Namun sangat berbeda jika ditinjau dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat perempuan Gampong Lampoh Daya mengatakan bahwa perempuan Gampong Lampoh Daya tidak mau terlibat dalam pemerintahan

⁹⁴ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

gampong karena masyarakat disana masih memandang perempuan hanya boleh bekerja di rumah saja. Persepsi ini mampu membuat perempuan tidak berkegiatan saat pembahasan dalam rapat untuk tidak melibatkan perempuan dalam pemerintahan. Selain itu tidak adanya dukungan dari suami dan sanak keluarga juga menjadi penghambat untuk perempuan mengajukan diri untuk terlibat dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat perempuan Gampong Lampoh Daya dalam wawancaranya:

Kami bukan tidak mau terlibat dalam pemerintahan gampong. Namun adat disini tidak mengizinkan kami para perempuan terlibat. Disini masih ada persepsi bahwa perempuan harus bekerja di rumah saja dan tidak ada dukungan dari masyarakat sendiri terhadap kami selain itu juga sulit mendapat kepercayaan dari keluarga. Contohnya saya ingin mengajukan diri untuk terlibat dalam pemerintahan akan tetapi suami dan pihak keluarga tidak setuju takutnya saya lalai dengan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. jadi memang sulit untuk perempuan terlibat disini.⁹⁵

Berdasarkan wawancara di atas menerjemahkan bahwa perempuan Gampong Lampoh Daya tidak ingin terlibat dalam pemerintahan gampong karena adat disana yang tidak mengizinkan perempuan terlibat dalam pemerintahan. Selain sulit mendapat kepercayaan dari masyarakat juga kesulitan mendapat izin dari suami dan keluarga karena dikira nantinya perempuan tidak mampu mengurus lagi rumah tangga.

Kemudian dengan tidak ada perwakilan suara perempuan di pemerintahan membuat perempuan tidak dapat ikut seutuhnya dalam pembangunan gampong. Perempuan terisolasi dari dunia pemerintahan. Banyak keperluan perempuan tidak terpenuhi. Walaupun sudah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti acara PKK dan kegiatan lainnya. Namun tidak maksimal karena anggaran yang seadanya sehingga membuat acarapun tidak maksimal seadanya saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat perempuan Gampong Lampoh Daya:

⁶⁶ Wawancara dengan masyarakat perempuan Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Memang benar ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan seperti acara PKK tetap jalan dan lainnya. Namun itu tidak maksimal dari segi anggarannya saja sangat terbatas padahal kami butuhnya sekian yang dikasi lebih sedikit. Sehingga menyebabkan acara tidak optimal karena kekurangan dana. Jadinya alakadarnya saja asal jadi. Ini sangat memprihatinkan. Saya yakin jika ada perempuan yang mewakili suara kami pasti tidak akan seperti ini.⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemenuhan hak perempuan memang sudah diupayakan oleh pemerintah gampong dengan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan. Namun dalam pelaksanaannya sangat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Masih belum maksimal. Hal ini dipercayai terjadi karena tidak adanya keterwakilan perempuan sehingga apa yang diperlukan oleh perempuan tidak terpenuhi dengan optimal.

Jika merujuk kepada teori yang dirumuskan oleh Longwe penulis melihat perempuan terdiskriminasi dari segi kesetaraan gender. Ini diakibatkan masih ada persepsi bahwa beban kerja perempuan hanya di rumah saja. Seperti yang dijelaskan Longwe dalam Dimensi Kesadaran Kritis Kesenjangan Gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Jadi perempuan Gampong Lampoh Daya dipandang sosial ekonominya lebih rendah dari laki-laki dan adat tradisional yang dilestarikan dalam pembagian kerja gender juga sangat berperan besar di gampong tersebut. Sehingga ruang gerak perempuan sangat dibatasi.

Dari paparan-paparan di atas dapat dilihat bahwa Gampong yang melibatkan perempuan dalam Tuha Peut terlihat bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong lebih menonjol dibandingkan dengan gampong yang tidak melibatkan. Gampong yang tidak menempatkan perempuan dalam tuha peut ataupun pemerintahan gampong bisa

⁹⁶ Wawancara dengan masyarakat perempuan Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

dilihat dari tidak ada keterwakilannya suara perempuan. Sehingga kesejahteraan dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan gampong terlihat jauh berbeda. Dimana yang melibatkan perempuan dalam Tuha Peut kesejahteraan dan kesetaraan gender terlihat baik dan sebaliknya untuk gampong yang sama sekali tidak melibatkan perempuan kesejahteraan dan kesetaraan gender sangat tidak baik dan tidak menjamin kebebasan berekspresi bagi perempuan.

4.3. Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

4.3.1. Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Geucheu Meunara

Untuk melihat ada tidaknya pengaruh dari anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong dapat diukur dari sejauh mana Tuha Peut perempuan dalam berperan memperjuangkan nasib perempuan di gampong. Sejauh ini anggota Tuha Peut perempuan Gampong Geucheu Meunara dalam memperjuangkan nasib perempuan dengan usaha melibatkan perempuan dalam segala musyawarah yang di laksanakan oleh gampong. Seperti memberi pemahaman kepada perempuan pentingnya Musrenbangdes untuk pembangunan yang pro terhadap perempuan. Selain itu dengan adanya keanggotaan Tuha Peut perempuan mampu mempengaruhi perempuan untuk terus mengawasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan di gampong. Ini dilakukan supaya setiap keputusan yang diputuskan oleh pihak gampong tidak hanya peduli pada kepentingan laki-laki akan tetapi juga memandang kepentingan perempuan dan terus mengawasi agar kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh anggota Tuha Peut perempuan Gampong Geucheu Meunara dalam wawancaranya:

Dengan terlibatnya kami di anggota Tuha Peut ini mengartikan bahwa kami akan mewakilkan suara perempuan. Peran kami disana memperjuangkan nasib perempuan agar terlibat dalam pembangunan gampong. Oleh karena itu kami mengupayakan dan memberi penjelasan

kepada perempuan apa pentingnya terlibat dalam musrenbangdes misalnya. Jadi dengan penjelasan dari kami perempuan sudah mau ikut kegiatan tersebut. Kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut perlu dihadiri oleh perempuan untuk memberi saran dan masukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena hanya perempuan yang paham kebutuhan perempuan. Menurut saya hal ini tidak bisa sepenuhnya dilepas kepada pihak laki-laki. Kemudian kami juga mengajak perempuan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di gampong dan ikut mengawasi keputusan tersebut dalam proses pelaksanaannya.⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh anggota Tuha Peut perempuan terhadap pembangunan gampong di Gampong Geucheu Meunara dapat dilihat dari bagaimana pihaknya merubah pandangan perempuan terhadap kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan di gampong. Sehingga anggota Tuha Peut perempuan mampu memberi dampak yang baik terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam segala musyawarah dan pengambilan keputusan serta pengawalan kebijakan yang dikeluarkan oleh gampong.

Hal di atas senada dengan yang dipaparkan oleh Geuchik Gampong Geucheu Meunara bahwa dengan adanya anggota perempuan di Tuha Peut sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat perempuan dalam segala kegiatan yang dilaksanakan di gampong. Seperti kehadiran dan keberanian untuk memberi ide masukan dan saran saran juga merupakan dampak dari adanya perempuan dalam Tuha Peut. Sehingga perempuan berani untuk berbicara dalam musyawarah-musyawarah yang diadakan. Karena sebelum diadakan rapat bersama perangkat gampong biasanya para perempuan akan membuat rapat terlebih dahulu untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan para perempuan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gauchik Gampong Geucheu Meunara dalam wawancaranya:

Jika ditanya ada tidaknya pengaruh anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong dapat dibilang sangat berpengaruh. Salah satu pengaruhnya dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di gampong. Jika laki-laki yang undang mereka segan untuk datang, akan tetapi jika perempuan yang mengundang

⁹⁷ Wawancara dengan anggota Tuha Peut perempuan Gampong Geucheu Meunara pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Geucheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

mereka pasti datang. Saya rasa ini salah satu pengaruhnya. Selain itu perempuan berani bicara mengusulkan ide dan saran dalam setiap musyawarah gampong saya rasa juga karena sudah ada penjelasan dari sesama perempuan sebelum datang ke kegiatan tersebut. Biasanya para anggota tuha peut perempuan akan mengumpulkan perempuan sebelum rapat dengan perangkat gampong dengan alasan untuk mendengar dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan yang kami lakukan. Jadi menurut saya sangat berpengaruh dengan adanya tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong yang pro terhadap perempuan itu sendiri.⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengaruh dari anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong sangat berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan masyarakat perempuan dalam mengusulkan dan menyarankan kebutuhan perempuan. Dengan begitu kesejahteraan perempuan akan ikut terjamin dengan adanya keterwakilan suara perempuan dalam pemerinatahn gampong.

Kemudian lebih jauh lagi jika dilihat Gampong Geucheu Meunara dengan adanya keterwakilan anggota perempuan dalam Tuha Peut mampu melahirkan kelompok anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. kelompok ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di gampong. Pembentukan kelompok tersebut dilatar belakangi oleh seringnya tindakan KDRT dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan. Sehingga perlu tempat mediasi dan tempat mengadu nasib bagi perempuan gampong. Dengan kata lain anggota perempuan Tuha Peut mengupayakan keterwakilannya dapat memberi dampak yang baik terhadap pembangunan gampong di mana dapat mensejahterakan perempuan dan anak di gampong tersebut. Hal ini senada dengan yang di paparkan oleh anggota Tuha Peut perempuan dalam wawancaranya:

Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut membuat kami lebih leluasa dalam berpartisipasi setiap kegiatan yang dilaksanakan gampong. Sehingga kami mendapat izin untuk membentuk kelompok anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. kami merasa kelompok ini perlu karena seiiirng terjadinya KDRT dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan. Jadi kami menyediakan tempat mediasi

⁹⁸ Wawancara dengan Geuchik Gampong Geucheu Meunara pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Geucheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

*dan sebagai tempat untuk mengadu nasib bagi perempuan gampong. Dengan harapan kehidupan perempuan di gampong menjadi sejahtera.*⁹⁹

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya tuha peut perempuan maka perempuan lebih leluasa dalam bergerak. Dengan adanya tuha peut perempuan memberi pengaruh terhadap kesejahteraan perempuan. Ini membuktikan bahwa keterwakilan anggota perempuan di Tuha Peut mampu memberi dampak dalam pembangunan gampong yang berbasis kesetaraan gender.

Jika penulis kaitkan dengan teori Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa disebut dengan Kriteria Pembangunan Perempuan (Women's Empowerment Criteria atau Women's Development Criteria), adalah suatu pendekatan analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan control. Maka penulis melihat bahwa Gampong Geucehu Meunara pengaruh anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong sudah sangat optimal. Dibuktikan dengan tercapainya 5 pemberdayaan perempuan tersebut yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan control sudah di dapatkan oleh perempuan Gampong Geucehu Meunara.

4.3.2. Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Emperom

Di Gampong Emperom anggota Tuha Peut perempuan memberi pengaruh yang besar terhadap pembangunan gampong. Hal ini terbukti dari keterlibatan anggota perempuan Tuha Peut dalam pembangunan akses kesehatan gampong seperti pembangunan balai posyandu, pembangunan saluran air, pembangunan WC umum dan pembangunan gedung PKK ini semua diajukan oleh Tuha peut perempuan dalam kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh gampong. Ini menandakan anggota Tuha Peut perempuan peduli pada pembangunan gampong.

⁹⁹ Wawancara dengan anggota Tuha Peut Perempuan Gampong Geucehu Meunara pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Geucehu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Geuchik Gampong Empesom dalam wawancaranya:

Peran anggota perempuan Tuha Peut sangat besar dalam pembangunan gampong ini. Mereka sangat peduli pada pembangunan di gampong. Contoh pada kegiatan musyawarah gampong mereka sempat mengajukan untuk membangun gedung PKK, balai Posyandu, Pembangunan saluran air dan pembangunan WC umum. Itu mereka yang ajukan dan kami sudah penuhi itu, sekarang sudah ada itu bangunannya.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan pengaruh anggota Tuha Peut perempuan sangat besar dalam pembangunan gampong di Gampong Emperom. Dengan adanya tuha peut perempuan mampu mengusulkan pembangunan-pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di gampong. Ini membuktikan bahwa Tuha Peut perempuan ikut terlibat dan peduli terhadap pembangunan gampong.

Selanjutnya Geuchik Emperom juga memaparkan bahwa pengaruh dari anggota Tuha Peut perempuan juga dapat dilihat dari tingkat kehadiran perempuan dan keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong. Dulu sebelum ada tuha peut perempuan kehadiran perempuan dalam kegiatan gampong sangat minim bahkan hampir tidak ada, namun semenjak perempuan di tempatkan di keanggotaan Tuha Peut mereka membentuk kelompok perempuan sehingga partisipasi perempuan terus meningkat. Ini menandakan bahwa perempuan mampu mempengaruhi perempuan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Geuchik Emperom dalam wawancaranya:

Tuha Peut perempuan bisa memberi dampak baik kepada masyarakat perempuan di gampong. Dengan adanya mereka partisipasi perempuan dalam kegiatan gampong jadi meningkat. Dulu sebelum ada tuha peut perempuan kehadiran perempuan dalam kegiatan gampong sangat minim bahkan hampir tidak ada, namun semenjak perempuan di tempatkan di keanggotaan Tuha Peut mereka membentuk kelompok perempuan sehingga berefek terhadap peningkatan keterlibatan dan kehadiran perempuan dalam kegiatan gampong. Perempuan sudah mau memberi

⁷² Wawancara dengan Geuchik Gampong Emperom pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

masuk-masukan dan ide-ide terkait pembangunan gampong. Jadi saya lihat ada hal positifnya disitu.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota Tuha Peut dapat memberi efek yang baik terhadap kehadiran serta keterlibatan perempuan dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh gampong. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari pengaruh anggota tuha peut perempuan dalam mengubah kebiasaan lama masyarakat khususnya perempuan.

Kemudian saat ini Gampong Emperom telah berhasil membentuk tempat simpan pinjam uang perempuan. Simpan pinjam tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan gampong. Diharapkan dengan adanya simpan pinjam tersebut usaha-usaha perempuan dalam mencari penghasilan dapat meningkat tanpa harus meminjam ke bank. Selain itu di Gampong Emperom juga sudah membentuk kelompok menjahit, kelompok kue dan kelompok kerajinan tangan. Kelompok ini dibentuk dengan harapan dapat membantu perempuan untuk produktif. Untuk kedepan sedang direncanakan akan mengusul diadakannya mesin cuci karena kebanyakan masyarakat perempuan bekerja sebagai tukang cuci. Jadi apabila dianggarkan untuk beli mesin cuci masyarakat bisa mencuci di rumah sendiri tanpa harus pergi kerumah-rumah untuk mencuci di sana. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh anggota Tuha Peut perempuan dalam wawancaranya:

Di Gampong Emperom kami sudah berhasil membentuk simpan pinjam perempuan. Kegunaannya untuk memutar modal usaha perempuan jadi ga perlu lagi ke bank untuk pinjam modal. Selain itu kami juga sudah membentuk kelompok menjahit, kelompok kue dan kelompok kerajinan tangan. Dengan harapan dengan adanya kelompok tersebut dapat membuat perempuan produktif. Rencananya kedepan kami akan mencoba mengusulkan di belikan mesin cuci karena kebanyakan masyarakat disini pekerjaannya mencuci baju orang. Jadi kalau ada mesin cuci nanti

¹⁰¹ Wawancara dengan Geuchik Gampong Emperom pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

*mereka cucinya di rumah sendiri aja tidak perlu lagi datang ke rumah-rumah untuk mencuci.*¹⁰²

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggota Tuha Peut perempuan sudah mampu mempengaruhi pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan. Perempuan gampong diupayakan tidak ketergantungan dengan pendapatan suami akan tetapi juga ikut produktif dengan kelompok-kelompok yang di bentuk. Selain itu dengan adanya simpan pinjam perempuan akan memudahkan perempuan dalam usaha mereka. Dengan begitu dapat dilihat bahwa Tuha Peut perempuan mampu mempengaruhi dalam pembangunan gampong di Gampong Emperom dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perempuan.

Lebih lanjut lagi anggota Tuha Peut perempuan juga memaparkan bahwa saat ini dukungan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan gampong di Gampong Emperom sudah sangat baik. Dukungan dari masyarakat perempuannya juga sangat baik. Jadi pihaknya lebih leluasa dalam membangun gampong dengan berspektif gender. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

*Di Gampong Emperom dukungan dari masyarakat terhadap kelibatan perempuan dalam pemerintahan dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sudah sangat mendukung. Ini terbukti dari tidak ada protes saat kami dipilih oleh Geuchik untuk ikut terlibat dalam pemerintahan. Sehingga kami lebih leluasa untuk terlibat dalam pembangunan gampong yang pro perempuan.*¹⁰³

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa saat ini Gampong Emperom mendukung kehadiran perempuan dalam pemerintahan. Dengan demikian akan lebih mudah bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan gampong yang pro perempuan. Sehingga kesejahteraan perempuan akan lebih terjamin.

¹⁰² Wawancara dengan anggota Tuha Peut Perempuan Gampong Emperom pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

¹⁰³ Wawancara dengan anggota Tuha Peut Perempuan Gampong Emperom pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Jika merujuk pada Teori Perubahan Funkisional yang menyatakan bahwa Perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsurunsur kebudayaan dalam masyarakat. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Jadi kita kaitkan dengan Gampong Empesom penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat dimana perempuan sudah diterima untuk terlibat dalam pemerintahan. Terbukti dengan terlibatnya perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut sehingga dengan adanya perempuan di keanggotaan tersebut mampu memberi dampak yang bermanfaat. Kemudian dapat dilihat pengaruh anggota Tuha Peut perempuan Emperom dalam pembangunan Gampong Emperom sudah maksimal dengan adanya beberapa terobosan yang dibentuk oleh Tuha Peut perempuan. Maka dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi di Gampong Emperom ialah Perubahan Funkisional.

4.3.3. Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Lamjamee

Dalam peraturan pemerintah telah disebutkan bahwa diwajibkan keterlibatan perempuan dalam keanggotaan lembaga tuha peut gampong. Tetapi di Gampong Lamjamee pada awal pembentukan lembaga tuha peut, tidak terdapat perwakilan dari perempuan yang ikut bersanding bersama laki-laki untuk duduk dalam keanggotaan lembaga tuha peut. Dikarenakan lembaga tuha peut setiap melakukan kegiatan duduk bersama dalam merumuskan kebijakan, atau dalam menyelesaikan permasalahan gampong, kegiatan tersebut selalu dilakukan pada malam hari. Budaya masyarakat Lamjamee tidak baik perempuan berada diluar rumah pada malam hari. Sifat atau karakter perempuan juga menjadi pertimbangan, perempuan masih dianggap lemah sebagai pengambil kebijakan, perempuan dianggap tidak tegas, dan tidak tegas dalam menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi di gampong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Geuchik Gampong Lamjamee dalam wawancaranya:

Jika ditanya pengaruh anggota Tuha Prut Perempuan dalam pembangunan gampong tidak ada, karena kami sudah bermusyawarah dan menyatukan pendapat untuk tidak melibatkan perempuan dalam pemerintahan gampong. Karena alasan tadi bahwa perempuan tidak baik keluar malam malam. Kami sering rapat malam, disini perempuan terlibat dalam pemerintahan masih tabu. Namun jika ditanya tentang pengaruh perempuan dalam pembangunan gampong itu ada, perempuan tetap kami libatkan. Missal posyandu tetap jalan, acara ibu-ibu PKK juga kami dukung kami anggarkan dananya agar bisa berjalan lancar. Selain itu perempuan juga dilibatkan dalam acara adat, missal ada acara pernikahan perempuan akan tetap jadi yang peusijek.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa budaya Gampong Lamjamee masih menganggap bahwa perempuan itu lemah dan tugas perempuan hanya mengurus rumah saja masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Gampong Lamjamee. Sehingga sangat sulit untuk perempuan untuk mengakses pemerintahan. Namun perempuan tetap dilibatkan dalam pembangunan gampong hanya saja dalam bentuk non pemerintahan seperti acara-acara adat pernikahan dan acara acara ibu PKK.

Namun didapati hal berbeda dalam paparan salah satu perempuan Gampong Lamjamee beliau mengatakan bahwa meskipun kegiatan perempuan tetap berjalan, akan tetapi tidak sepenuhnya perempuan mendapat hak mereka. Seperti gampong ini tidak memiliki kelompok anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi perempuan merasa tidak ada tempat untuk mengadu permasalahan yang mereka hadapi. Kebanyakan persoalan rumah tangga, korbannya selalu perempuan, jadi akan lebih mudah jika berbicara dengan perempuan juga. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat perempuan dalam wawancaranya:

Memang benar kegiatan perempuan tetap berjalan, akan tetapi kebutuhan kami tidak semua terpenuhi. Lihat saja gampong kami tidak ada itu kelompok anti kekerasan terhadap perempuan seperti gampong lain. Padahal kami juga perlu kelompok itu untuk mengatasi permasalahan yang kami hadapi. Seperti permasalahan keluarga yang korbannya selalu perempuan kepada siapa kami mengadu. Karena akan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

*lebih mudah berbicara sesama perempuan. Kan tidak mungkin saya menceritakannya kepada laki-laki.*¹⁰⁵

Berdasarkan Wawancara di atas dapat dilihat bahwa banyaknya permasalahan yang terjadi di gampong, dan kebanyakan adalah persoalan rumah tangga. Banyak perempuan yang tidak tahu harus mengadu kemana untuk mendapatkan solusi, karena persoalan demi persoalan yang terjadi banyak melibatkan perempuan dan dianggap perempuan lebih memahami sesama. Oleh karena itu seharusnya pemerintahan gampong mengambil kebijakan untuk melibatkan perempuan dalam lembaga tuha peut gampong, agar dapat menampung segala persoalan perempuan di gampong.

Jika kita merujuk pada teori Longwe dari segi Akses Kesenjangan Gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya. Maka jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi Gampong Lamjamee terlihat jelas terjadi kesenjangan gender, laki-laki lebih diutamakan dalam setiap aktivitas gampong. Sehingga perempuan tidak terlibat dalam segala bentuk pemerintahan di gampong yang berdampak pada tidak sejahteranya perempuan di gampong.

4.3.4. Pengaruh Keterwakilan Anggota Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong Di Gampong Lampoh Daya

Proses pembentukan lembaga tuha peut gampong yang terdapat dalam Gampong Lampoh Daya sama sebagaimana pembentukan lembaga tuha peut di Gampong-gampong lain pada umumnya. Pembentukan lembaga tuha peut setiap kabupaten sudah diatur dalam undang-undang pemerintah Aceh maka setiap

¹⁰⁵ Wawancara dengan masyarakat perempuan Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

kabupaten hanya mengintruksikan kepada setiap kecamatan, agar lembaga tuha peut setiap gampong dapat diwujudkan. Bagi masyarakat Lampoh Daya keberadaan tuha peut gampong merupakan suatu kebutuhan. Lembaga tuha peut gampong bagi mereka adalah tempat dimana masyarakat dapat tersaring segala persoalan yang sedang dihadapi, dan menemukan solusi dari permasalahan mereka, lembaga tuha peut juga dipandang sebagai tempat pengambilan (merumuskan) kebijakan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Namun yang berbeda dari Gampong Lampoh Daya dengan gampong lainnya pada Gampong Lampoh Daya perempuan tidak dilibatkan dalam keanggotaan Tuha Peut. Dengan alasan perempuan dianggap lemah dan kurang efektif bila terlibat dalam pemerintahan gampong. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Geuchik Lampoh Daya dalam wawancaranya:

Gampong ini sedikit berbeda dengan gampong lainnya, kami tidak ikut melibatkan perempuan dalam pemerintahan. Ini bagian dari budaya kami karena masyarakat menganggap tugas perempuan adalah di rumah dan kurang efektif dan tidak mampu bekerja secara maksimal apabila dilibatkan dalam pemerintahan. Jadi di anggota Tuha Peut perempuan itu kami tiadakan.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa perempuan dianggap lemah dan tidak optimal dalam bekerja apabila di tempatkan dalam roda pemerintahan. Selain itu budaya lokal yang melarang perempuan terlibat dalam pemerintahan juga masih dibudayakan. Sehingga perempuan tidak punya ruang di pemerintahan. Ini sangat berdampak pada keterwakilan suara perempuan terhadap pembangunan gampong.

Dalam pembangunan desa seharusnya melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 78 UU Desa yang berbunyi Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

⁷⁸ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal ini dapat dipahami bahwa seluruh elemen masyarakat harus terlibat tidak terkecuali perempuan dalam mendapatkan manfaat dalam pembangunan desa.

Namun demikian menurut Geuchik Lampoh Daya untuk tahun depan akan diupayakan keterlibatan perempuan dalam Tuha peut, dikarenakan ini sebuah aturan maka akan dilaksanakan. Oleh karena itu perangkat gampong sedang berdiskusi untuk meminta saran dan pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat dan meminta dukungan untuk dapat melibatkan perempuan dalam tuha peut gampong dan melibatkan perempuan dalam pembangunan gampong juga. Hal ini diungkapkkan dalam wawancaranya:

Sebenarnya sekarang kami sedang mengupayakan untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan gampong secara struktural di tahun depan. Jadi ini kami sedang dengar pendapat dari tokoh-tokoh desa terkait ingin melibtakan perempuan. Kita harapkan keputusannya yang terbaik.¹⁰⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sudah ada niat untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan gampong. Dapat dilihat saat ini perangkat gampong sedang mendengar pendapat dari tokoh-tokoh gampong dalam upaya melibatkan perempuan

Jika kita merujuk pada teori Longwe dari segi Akses Kesenjangan Gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya. Maka jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi Gampong Lampoh Daya tidak jauh berbeda dengan Gampong Lamjamee dimana terlihat jelas terjadi kesenjangan gender, laki-laki lebih diutamakan dalam setiap aktivitas gampong. Sehingga

¹⁰⁷ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

perempuan tidak terlibat dalam segala bentuk pemerintahan di gampong yang berdampak pada tidak sejahteranya perempuan di gampong.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh anggota Tuha Peut perempuan terhadap pembangunan gampong di Kecamatan Jaya Baru pada gampong yang menempatkan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut terlihat sangat jelas dampak yang diberikan. Dimana akses dalam pemerintahan sangat mudah, akses perumusan kebijakan sudah baik dan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan perempuan terlaksana dengan optimal. Sehingga kesejahteraan perempuan terlihat sangat baik. Namun terlihat perbedaan yang sangat kontras dengan gampong yang tidak melibatkan anggota perempuan dalam Tuha Peut Gampong, dimana pembangunan gampong tidak dapat diakses secara leluasa oleh perempuan, banyak kepentingan laki-laki saja yang terpenuhi sedangkan kebutuhan perempuan banyak terbengkalai. Bahkan perempuan di kucilkan dalam pemerintahan. Sehingga mengakibatkan tidak adanya keterwakilan suara perempuan dan membuat perempuan jauh dari kata sejahtera

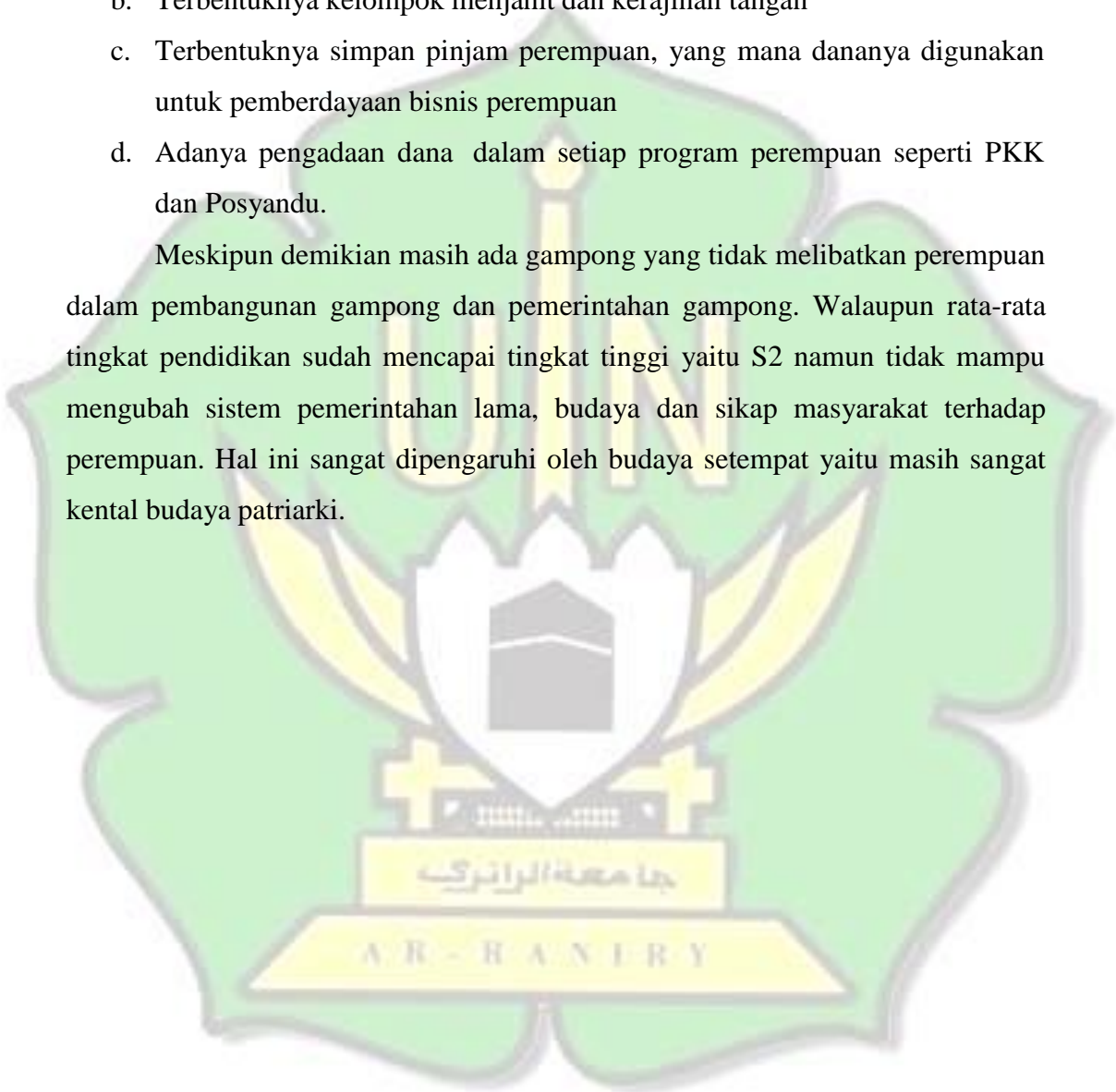
4.4. Analisis Keterwakilan Tuha Peut Perempuan Dalam Pembangunan Gampong

Sebenarnya keterwakilan Tuha Peut Perempuan dalam pembangunan gampong sangat diperlukan untuk kesejahteraan perempuan itu sendiri dalam gampong. Terlihat saat perempuan dilibatkan dalam pemerintahan perempuan akan lebih leluasa dalam menentukan nasib mereka sendiri. Saat perempuan tidak dilibatkan dalam pemerintahan ini akan mengakibatkan tidak adanya keterwakilan suara perempuan dalam pemerintahan gampong khususnya dalam keanggotaan Tuha Peut. Sehingga perempuan tidak akan mencapai kesejahteraan, hal ini dikarenakan perempuan tidak mampu mengakses pemerintahan yang menyebabkan tidak leluasa dalam menentukan nasib mereka sendiri di dalam gampong.

Terlihat suara perempuan mampu mengarahkan kebijakan-kebijakan gampong untuk pro perempuan. Adapun beberapa keberhasilan keterwakilan perempuan dalam pembangunan gampong:

- a. Terbentuknya kelompok anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Terbentuknya kelompok menjahit dan kerajinan tangan
- c. Terbentuknya simpan pinjam perempuan, yang mana dananya digunakan untuk pemberdayaan bisnis perempuan
- d. Adanya pengadaan dana dalam setiap program perempuan seperti PKK dan Posyandu.

Meskipun demikian masih ada gampong yang tidak melibatkan perempuan dalam pembangunan gampong dan pemerintahan gampong. Walaupun rata-rata tingkat pendidikan sudah mencapai tingkat tinggi yaitu S2 namun tidak mampu mengubah sistem pemerintahan lama, budaya dan sikap masyarakat terhadap perempuan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yaitu masih sangat kental budaya patriarki.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong Di Kecamatan Jaya Baru, maka bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas dapat penulis simpulkan bahwa bentuk gampong yang melibatkan Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong terlihat saat perempuan dilibatkan langsung dalam pemerintahan, perempuan bisa menyampaikan kritik dan saran sehingga suara perempuan akan didengar. Sedangkan bentuk gampong yang tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut terlihat saat perempuan sama sekali tidak terlibat dalam pembangunan gampong, suara perempuan cenderung diabaikan hal ini dikarenakan tidak adanya keterwakilan suara perempuan dalam pemerintahan gampong sehingga perempuan tidak terlibat langsung dalam pembangunan gampong.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran perempuan di Tuha Peut mampu mempengaruhi kesejahteraan gender dan perempuan di level gampong ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang pro terhadap perempuan. Seperti kelompok anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok menjahit, kelompok kerajinan tangan, kelompok simpan pinjam khusus perempuan dan aktifnya posyandu serta PKK gampong. Sangat berbeda dengan gampong yang sama sekali tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut terlihat pada gampong tersebut perempuan sangat terpinggirkan, banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak pro terhadap perempuan. Sehingga kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan sangat tidak terjamin.

5.2. Saran

- a. Diharapkan kepada gampong yang tidak melibatkan perempuan dalam roda pemerintahan terkhusus dalam kelembagaan tuha peut untuk dapat melibatkan perempuan. Selain karena ada aturan yang mewajibkan keterlibatan perempuan juga dikarenakan kebutuhan perempuan hanya akan dipahami oleh perempuan, jadi tidak memungkinkan laki-laki dapat seutuhnya memahami apa yang diperlukan oleh perempuan
- b. Perempuan harus lebih terlibat aktif dan partisipatif dalam memperjuangkan hak nya. Perempuan harus sadar bahwa kepentingan perempuan harus terpenuhi dan perempuan bukan makhluk lemah. Perempuan harus sadar dan yakin bahwa dirinya juga mampu melakukan hal yang dilakukan oleh lelaki termasuk dari segi memimpin.
- c. Diharapkan kepada gampong yang sudah menjalankan perintah qanun dan UU dalam pemerintahan desa untuk terus mempertahankan hal tersebut. Teruntuk perempuan yang telah dilibatkan untuk terus menjaga haknya dan terus mengawasi setiap kebijakan gampong yang dikeluarkan oleh gampong.
- d. Kepada pihak Universitas ataupun kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait keterwakilan tuha peut perempuan dalam pembangunan gampong.
- e. Kepada pemerintah daerah qanun ini diharapkan dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya terkhusus kepada pemerintah gampong diharapkan dapat diimplementasikan sesegera mungkin,
- f. Kepada lembaga masyarakat ataupun organisasi perempuan untuk lebih aktif memberikan dukungan dan mengawal proses pelaksanaan qanun ini di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Peran Perempuan Dalam Lembaga Tuha Peut sebagai Lembaga Adat Aceh dan Pemerintahan Gampong, vol.15, No.2, 2015,
- A. Lassa Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks) Jonatan, Coordinator Hivos Aceh Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002
- Badruzzaman Ismail, dkk, *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007
- Ernita Dewi, *Peran Perempuan Dalam Sistem Adat di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020)
- Furchan Arif, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
- I Wayan Koyan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),
- Kamaruddin, dkk., “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, Nomor 1 (mei, 2013)
- Kartono, Drajat Tri, *Sosiologi Distribusi*, Universitas Terbuka, (Jakarta, pp.1-54.ISBN).
- Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang: UMM Press. Stephen P. Rpbbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, terjemahan Hadyana Pujaatmaka, (Jakarta: Prenhallindo, 1996),
- Mosse, J.C. *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007).
- Qanun Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2004 Tentang Unsur-unsur Tuha Peut Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tuha Peut Gampong.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab V Pasal 31 Ayat 1, Pasal 33 ayat 2. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta, Republik Indonesia).

Syahrul, M, *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Pembangunan Desa* (Jakarta, 2014).

Solekhan, M, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang, Setara Press, 2014). Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),

Sukmadinata, *Landasan Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Soerdarsono dan Gatut Murniatmo, *Nilai Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan Pengkajian Proyek Penelitian Kebudayaan Nusantara Bagian Jawa, 1986

Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe, *Jurnal Pemikiran Islam Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh,

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Aceh: Nadiya Foundation, 2004),

Wawancara dengan anggota Tuha Peut Prempuan Gampong Emperom pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Wawancara dengan anggota Tuha Peut Prempuan Gampong Geucheu Meunara pada tanggal 27 September 2021 di Gampong Geucheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Wawancara dengan masyarakat perempuan Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Wawancara dengan masyarakat perempuan Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Geuchik Gampong Geuceheu Meunara pada tanggal 27 September 2021 di Gampong Geuceheu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Geuchik Emperom pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamjamee pada tanggal 29 September 2021 di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Geuchik Gampong Lampoh Daya pada tanggal 30 September 2021 di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

